



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 48, 2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - u. Dinas Pariwisata;
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - x. Sekretariat Daerah;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Inspektorat;
 - dd. Kecamatan Ciputat;
 - ee. Kecamatan Ciputat Timur;
 - ff. Kecamatan Pamulang;

- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 September 2025
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 26 September 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Ika Kurniasih

S. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan, merupakan perwujudan otonomi daerah yang dijalankan berdasarkan kondisi, karakteristik wilayah perkotaan, sosial-budaya, serta potensi sumber daya manusia yang dimiliki daerah.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan sekaligus peluang strategis dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga. Bonus demografi, dinamika masyarakat urban, serta perkembangan teknologi digital menjadi faktor yang mendorong urgensi bagi pemerintah kota untuk merumuskan arah pembangunan pemuda dan olahraga yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dalam implementasinya, pembangunan kepemudaan dan olahraga harus selaras serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, sehingga visi kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan pemuda dapat dicapai secara menyeluruh.

Sesuai amanat Pasal 260 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dengan landasan ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan menengah yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2025–2029, serta sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan 2025–2045.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Tangerang Selatan yang berfungsi sebagai pedoman dan arah

pembangunan daerah periode 2025–2029. Terkait kewajiban OPD dalam penyiapan rencana kerja lima tahunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis (Renstra PD). Oleh karena itu, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Dokumen ini juga dilengkapi rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan 2025–2029, diharapkan perangkat daerah ini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terarah dalam meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kepemudaan dan olahraga bagi terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2022, tambahan Lembar Negara Nomor 6782)
- 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
- 10 Undang undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5671); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 4707);
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 87 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5235);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 6123);
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2007 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sector Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163 tahun 2017);
- 17 Peraturan Presiden Nomor Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
- 18 Perpres Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
- 22 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- 23 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 24 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Kepemudaan
- 25 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 26 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- 27 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029;
- 28 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 29 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030 dimaksudkan sebagai arah pembangunan dan acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Tangerang Selatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- 1 Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode Tahun 2025-2030;

- 2 Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan selama periode Tahun 2025-2030;
- 3 Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan; serta
- 4 Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan baik tahunan maupun lima tahunan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
- 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
- 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan Berkaitan dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.3. Isu Strategis Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis PD

3.2. Strategi Renstra PD

3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

4.2. Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dan Program Unggulan Kdh/Wkdh

4.3. Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan 5 (Lima) Tahun Terakhir

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga,

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;

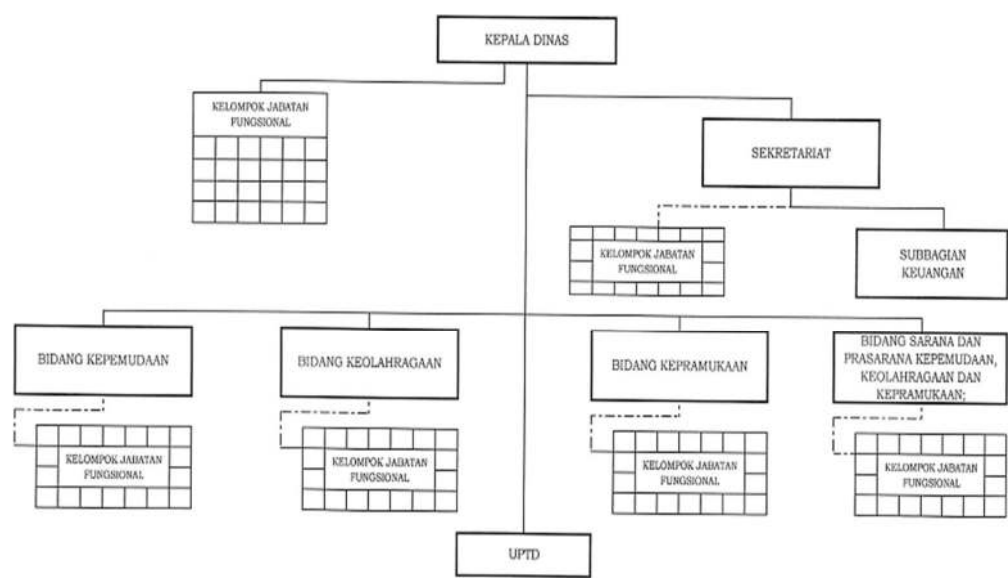
- e. Bidang Kepramukaan;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi :



2. 1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Merujuk kepada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Kepala Dinas melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- g. penyusunan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- h. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- i. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- j. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional masyarakat
- k. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga;

- l. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- m. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- n. perencanaan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

2 Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Sekretaris melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;

- g. pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/ penyelenggaraan rapat kedinasan;
- j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
- k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
- l. pengelolaan barang milik daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
- q. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, umum dan kepegawaian dan dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

3 Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan lingkup Dinas;
- i. mengoordinasikan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- k. melaksanakan tugas bendahara penerimaan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
- m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

4 Kepala Bidang Kepemudaan

Kepala Bidang Kepemudaan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan pemuda. Kepala Bidang Kepemudaan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Kepemudaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Kepemudaan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Kepemudaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Kepemudaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan sub urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan;
- f. penyelenggaraan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- g. penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- i. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lainnya;
- j. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- k. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- l. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- m. penyelenggaraan rekomendasi dan sertifikasi kepemudaan;
- n. penyediaan data dan informasi kepemudaan;

- o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Kepemudaan;
- p. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Kepemudaan;
- q. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Kepemudaan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

5 Kepala Bidang Keolahragaan

Kepala Bidang Keolahragaan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. Kepala Bidang Keolahragaan melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Keolahragaan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Keolahragaan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Keolahragaan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Keolahragaan;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Keolahragaan;
- f. Penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- g. Penyelenggaraan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;

- i. Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga di satuan pendidikan dan masyarakat;
- j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga tingkat Daerah serta partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- k. Pengoordinasian dan penyelenggaraan seleksi atlet Daerah, pemusatan latihan Daerah dan ilmu pengetahuan teknologi keolahragaan (sport science);
- l. Pengoordinasian dan penyelenggaraan standardisasi keolahragaan dan layanan khusus;
- m. Peningkatan kerja sama keolahragaan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lainnya;
- n. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga dan organisasi olahraga yang berprestasi/berjasa;
- o. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemassalan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- p. Penyelenggaraan rekomendasi dan sertifikasi kepada atlet dan pelatih berprestasi;
- q. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Keolahragaan;
- r. Penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Keolahragaan;
- s. Pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Keolahragaan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

6 Kepala Bidang Kepramukaan

Kepala Bidang Kepramukaan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional bidang pembinaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan dan organisasi kepramukaan. Kepala Bidang Kepramukaan melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Kepramukaan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Kepramukaan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Kepramukaan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Kepramukaan;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Kepramukaan;
- f. Penyelenggaraan program pengembangan kapasitas kepramukaan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah;
- i. Penyediaan data dan informasi kepramukaan;
- j. Pengoordinasian partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan;
- k. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat Daerah;
- l. Penyelenggaraan kegiatan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di Daerah;
- m. Penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Kepramukaan;
- n. Penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Kepramukaan

- o. Pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Kepramukaan;
- p. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Kepramukaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

7 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan memiliki tugas melaksanakan perumusan, perencanaan, pemeliharaan, standarisasi dan akreditasi, pengadaan dan pengembangan serta kebijakan operasional sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;

- f. perumusan dan perencanaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- g. pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- h. standardisasi dan akreditasi sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- i. pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- j. penyelenggaraan rekomendasi sarana dan prasarana keolahragaan;
- k. pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan tingkat Daerah;
- l. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- m. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- n. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

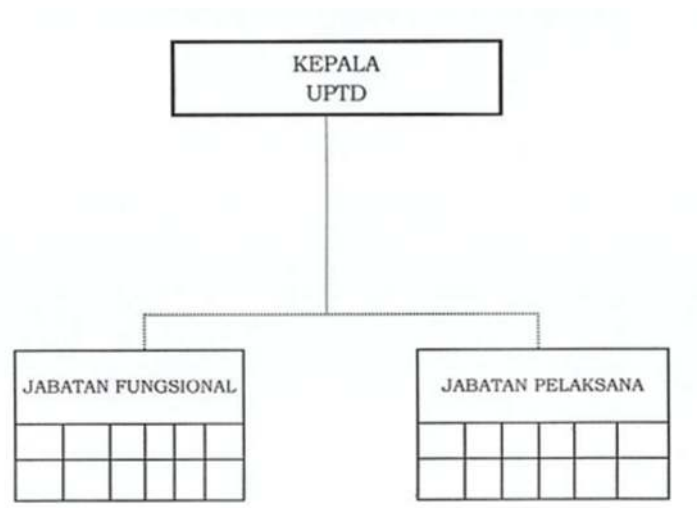
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga adalah UPTD yang melaksanakan tugas teknis

operasional Dinas dibidang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang tersusun sebagai berikut.

- a. Kepala;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.



Gambar 2. 2.Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Merujuk Kepada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1 Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga

Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah. Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud memiliki uraian tugas:

- a. Mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan, serta naskah dinas UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, memeriksa, dan mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas
- e. Melaksanakan pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga, pemuda, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat, cabang olahraga, dan instansi lainnya;
- f. Melaksanakan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas;
- g. Melaksanakan promosi, publikasi, dan kerja sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. Melaksanakan pemungutan retribusi dan / atau pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga beserta fasilitasnya yang dikelola oleh Dinas;
- i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan operasional UPTD; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dengan Dinas dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas. Pemangku jabatan bertanggung jawab:

- a. Mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab:

- a. Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.
- b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung sesuai jenjang jabatan kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

II.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data Desember 2024 jumlah pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebanyak 269 orang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.

Berdasarkan komposisi dan jumlah personil lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tergambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Komposisi dan Jumlah Personil

No	Uraian	Jumlah	Persen
1	Pegawai Negeri Sipil	31 Orang	12,01 %
2	PPPK	145 Orang	56,20%
3	PPPK Paruh Waktu	34 Orang	13,18%
4	Non ASN	48 Orang	18,60%

Komposisi jabatan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan terdata sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kepala Subbagian	-	-	1	-	1
5	Kepala UPTD	-	-	1	-	1
6	Jabatan Fungsional	-	-	10	3	13
7	Pelaksana	-	-	10	-	10
Total		-	-	24	7	31

Komposisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	3	1	-	-	4
4	Kepala Subbagian	-	-	1	-	-	1

5	Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-	1
6	Jabatan Fungsional	-	6	7	-	-	-	13
7	Pelaksana	-	1	9	-			10
Total		-	13	18	-	-	-	31

2 Sarana Prasarana

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga diperlukan sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri sebagai berikut :

a. Aset atau Belanja Modal

Tabel 2. 4. Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Nama Barang	Jumlah
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
2	Kamera Digital	1
3	Lap Top	2
4	Meja Kerja	8
5	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4
6	P.C Unit	2
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
9	Selang Air	4
10	Tripod Camera	1
11	Alat Musik Modern/Band	5

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

b. Sarana Prasarana Olahraga

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga diperlukan sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Sarana	Alamat / Lokasi
1	Lap. Tennis Sektor 3 Bintaro	Jl. Bintaro Utama 3A, Kel. Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan
2	Lap. Softball Alam Sutera	Jl. Griya Hijau Raya Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
3	Lap. Bola Parigi	Jl. Raya Perigi Lama No.13B, Kel. Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan
4	Sportcenter Bintaro Regency	Jl. Sumatera Komplek Villa Bintaro Regency, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan
5	Stadion Mini Ciputat	Jl. Pendidikan, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
6	Lap. Tennis Setu	Jl. Raya Serpong - Puspitek No. 1, Kel. Pagedangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan
7	GOR Ciputat	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 2 Kel. Ciputat Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
8	GOR Badminton Ciputat/GSG Vila Mutiarra	Jl. Mirah III No. 27 Rt/Rw 02/02, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
9	Lap. Bola Rempoa	Jl. Pahlawan, Jl. Anggur 1, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
10	Lap. Bola Villa Pamulang	Villa Pamulang, Jl. Sinta Raya, Kel. Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
11	Kolam Renang Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok A, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan
12	Sport Center Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok D, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan

No	Sarana	Alamat / Lokasi
13	Lap. Tennis Villa Pamulang Mas	Jl. Lele Villa Pamulang Mas, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
14	Lapangan Sepak Bola Kel.Rengas	Jl. Cemp. Raya No.5, Rengas, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
15	Lapangan Voli Serut	Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15220
16	Jogging Track Ciater	Jalan Widya Kencana Ciater, Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
17	Club House Green Park	Jl. Palapa, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414
18	Lapangan Cilenggang Serpong	Jl. Raya Serpong KM. 16, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten., Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
19	GSG/Gedung Serba Guna Olah Raga	Kelurahan Cempaka Putih
20	Lapangan Futsal Benda Baru	Jl. Benda Timur VII A No.10/11, Benda Baru, Pamulang, South Tangerang City, Banten 15415
21	Lapangan Futsal Perum Maharta	East Pondok Kacang, Pondok Aren, South Tangerang City, Banten
22	Lapangan Voli Parakan	Jln. TPU Parakan RT.01/09 Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416
23	Stadion Mini Pakujaya	Jl. Raya Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang

No	Sarana	Alamat / Lokasi
24	Lapangan Kecamatan Pondok Aren	Jl. Graha Raya Bintaro No. Kelurahan, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan secara umum dan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemberdayaan olahraga, koordinasi bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda serta bidang kepramukaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan, perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas pemuda dan olahraga serta kepramukaan sampai dengan Tahun 2026 dapat terlihat pada tabel lampiran yang tertuang dalam matrik Renstra 2021–2026.

apaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif positif, meskipun dengan dinamika yang perlu dicermati secara kritis. Data memperlihatkan bahwa pada 2020–2021 tingkat partisipasi masih berada pada angka stagnan

sebesar 0,26%, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada 2022 hingga mencapai 1,57%, meningkat lagi menjadi 1,89% pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 1,78% pada 2024. Pola tersebut merefleksikan adanya pergeseran perilaku dan preferensi pemuda terhadap aktivitas ekonomi mandiri yang kemungkinan besar ditopang oleh penguatan ekosistem kewirausahaan, kemudahan akses terhadap platform digital, serta berkembangnya ruang-ruang kreatif pada sektor formal maupun informal. Namun demikian, angka partisipasi yang masih berada di bawah 2% dari total potensi pemuda menandakan bahwa kontribusi pemuda dalam kemandirian ekonomi belum optimal. Kondisi ini mengimplikasikan kebutuhan terhadap strategi penguatan yang lebih terstruktur, baik melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, perluasan akses permodalan, maupun pembentukan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan dalam horizon lima tahun mendatang.

Pada dimensi lain, capaian prestasi olahraga memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada 2020 jumlah prestasi tercatat sebanyak 38, melonjak sangat tajam menjadi 393 pada 2021, namun kembali menurun drastis ke angka 32 pada 2022, kemudian hanya sedikit meningkat menjadi 33 pada 2023. Dinamika ini menunjukkan bahwa pencapaian prestasi olahraga masih sangat dipengaruhi oleh faktor momentum, misalnya adanya event kompetisi berskala besar pada 2021, serta masih lemahnya keberlanjutan dalam pola pembinaan atlet muda. Fenomena tersebut menegaskan bahwa meskipun potensi prestasi olahraga pemuda relatif tinggi, namun belum terdapat sistem pembinaan yang konsisten, terukur, dan berbasis pada pengembangan talenta secara berjenjang.

Kedua indikator strategis ini—partisipasi ekonomi mandiri dan capaian prestasi olahraga—merefleksikan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kepemudaan dan olahraga di masa mendatang. Dari aspek ekonomi, capaian yang masih rendah dibandingkan basis populasi pemuda mengindikasikan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih progresif dalam menumbuhkan partisipasi pemuda pada sektor-sektor ekonomi produktif. Dari aspek olahraga, fluktuasi prestasi menuntut adanya sistem pembinaan yang lebih konsisten, penguatan infrastruktur, serta pendekatan berbasis sains olahraga untuk menjamin kesinambungan prestasi.

Dalam kerangka pembangunan lima tahun ke depan, temuan kuantitatif ini dapat dijadikan pijakan strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan pemuda. Pertama, penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda

melalui akses pembiayaan, program inkubasi, serta pelatihan digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kedua, penciptaan lapangan kerja kreatif berbasis potensi lokal guna meningkatkan dampak partisipasi pemuda tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara substantif terhadap perekonomian daerah. Ketiga, pembinaan olahraga yang berkelanjutan dengan menekankan pada pencarian bakat usia dini, pelatihan berbasis sains, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keempat, integrasi program kepemudaan dan olahraga untuk mengembangkan keterampilan non-teknis (soft skills) seperti disiplin, kepemimpinan, dan daya saing, yang dapat diaplikasikan baik dalam dunia usaha maupun dunia kerja.

Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak sekadar merekam kinerja pembangunan masa lalu, melainkan juga memberikan landasan empiris dan konseptual bagi perumusan kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga yang lebih terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan struktural dalam lima tahun ke depan.

Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU/ Indikator Kinerja Urusan	Target IKU Daerah/IKU Urusan Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian			Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	X	V	1,00%	2,77%	5,00%	2,74%	4,57%	5,00%	274%	164%	100%	

	Kemasyar akatan												
2	Peningka tan Prestasi Olahraga	X	V	5 Me dali	11 Me dali	32 Me dali	11 Me dali	32 Me dali	33 Me dali	22 0%	29 0%	10 3%	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Keterangan: *Tahun belum berjalan

Pola capaian kinerja anggaran tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan dukungan terhadap sektor kepemudaan dan olahraga. Tren peningkatan pagu dari tahun ke tahun mencerminkan prioritas yang semakin besar pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di bidang ini. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan manajemen program serta percepatan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat mendekati 100%. Kinerja penganggaran dapat terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih maksimal.

Capaian Kinerja Penganggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024, realisasi anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, pagu anggaran sebesar Rp39,87 miliar terealisasi sebesar Rp37,45 miliar atau 93,94%. Kinerja ini menunjukkan adanya pemanfaatan anggaran yang cukup optimal meskipun belum mencapai 100%. Tahun 2023 memperlihatkan peningkatan baik dari sisi pagu maupun realisasi, yaitu dengan pagu Rp42,48 miliar dan realisasi Rp41,53 miliar atau setara dengan 97,77%, capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Memasuki tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan pada pagu anggaran menjadi Rp48,78 miliar dengan realisasi Rp45,95 miliar. Walaupun persentase capaian menurun menjadi 94,19%, secara nominal anggaran yang berhasil direalisasikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan

persentase ini dapat dikaitkan dengan adanya program baru yang membutuhkan alokasi dana besar, sementara proses realisasi menghadapi kendala teknis dan administratif. Dengan demikian, meskipun secara presentase sedikit menurun, capaian kinerja tetap menunjukkan konsistensi di atas 90%, yang mengindikasikan pengelolaan anggaran yang baik.

Tabel 2. 7. Capaian Kinerja Penganggaran

No	Uraian	2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	39.874.668.764	37.457.514.036	93,9	42.482.038.375	41.535.381.711	97,7	48.787.240.307	45.951.517.035	94,1

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.1.3.2. Kondisi Pembangunan Kepemudaan

Kondisi Pembangunan Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda sebagai aset strategis masa depan. Pembangunan kepemudaan tidak hanya menyangkut pengembangan potensi, minat, dan bakat, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap pendidikan, olahraga, dan lapangan kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi kepemudaan mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya pemuda yang sehat, produktif, berdaya saing, serta memiliki peran aktif dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat.

1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berfungsi sebagai ukuran komposit yang merefleksikan capaian pembangunan pemuda lintas lima domain fundamental pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi, serta kepemimpinan. Dengan sifatnya yang multidimensional, IPP tidak dapat dipandang sebagai hasil dari satu program sektoral, melainkan akumulasi kinerja lintas bidang pembangunan. Data pada Tabel 2.81 menunjukkan bahwa IPP Kota Tangerang Selatan mengalami tren peningkatan relatif konsisten dari 52,31 pada tahun 2021 menjadi 55,86 pada tahun 2024, atau naik sebesar

+3,55 poin (+6,79%) dalam kurun tiga tahun. Laju pertumbuhan rata-rata sebesar +1,18 poin per tahun ini menandakan adanya progres yang berkesinambungan, meskipun masih berada dalam kategori “sedang” (52–56). Posisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda telah bergerak menuju arah positif, tetapi belum mencapai tingkat optimal yang memungkinkan pemuda memainkan peran strategis penuh dalam pembangunan daerah.

Kenaikan IPP yang lebih tinggi pada periode 2023–2024 (+1,33 poin) dapat ditafsirkan sebagai sinyal efektivitas intervensi kebijakan pada beberapa domain, khususnya partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini selaras dengan data mikro yang menunjukkan peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan hingga 5% pada tahun 2024 serta tumbuhnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meskipun masih terbatas pada 1,78%. Temuan ini mengindikasikan bahwa domain partisipasi–kepemimpinan telah menjadi motor penggerak awal pembangunan pemuda di Kota Tangerang Selatan, sementara domain kesempatan kerja masih menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam isu transisi sekolah–kerja, tingginya potensi NEET (Not in Employment, Education, or Training), serta keterbatasan akses permodalan dan inkubasi wirausaha muda.

Namun demikian, sifat IPP yang bersifat agregat dapat menyamarkan variasi internal antardomain maupun antarwilayah. Misalnya, terdapat kemungkinan kesenjangan capaian berdasarkan gender, status sosial-ekonomi, lokasi kelurahan, atau kondisi khusus seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, disaggregasi data IPP menurut domain dan kelompok sasaran menjadi kebutuhan mendesak untuk diagnosis kebijakan yang lebih presisi.

Dari perspektif proyeksi, tren historis dengan laju +1,18 poin/tahun menempatkan IPP Kota Tangerang Selatan pada kisaran 61,78 pada tahun 2029 (skenario baseline). Dalam skenario konservatif (+1,0 poin/tahun), capaian diperkirakan sekitar 60,86; sementara skenario akseleratif (+1,5 poin/tahun) berpotensi mencapai 63,36. Rentang 61–63 ini dapat dijadikan sebagai lintasan kinerja strategis, dengan target tahunan diturunkan secara lebih granular ke dalam indikator domain.

Implikasi kebijakan lima tahun ke depan menekankan beberapa strategi kunci:

- 1 Penguatan domain kesempatan kerja melalui perluasan program pelatihan vokasional–digital, peningkatan akses pembiayaan dan

inkubasi wirausaha muda, serta kemitraan penempatan kerja dengan sektor industri.

- 2 Optimalisasi domain pendidikan melalui penguatan transisi SMA/SMK ke perguruan tinggi atau pasar kerja, remediasi literasi-numerasi, serta perluasan akses sertifikasi keterampilan.
- 3 Peningkatan domain kesehatan dan kesejahteraan dengan fokus pada kesehatan reproduksi remaja, kesehatan mental, gizi seimbang, dan peningkatan aktivitas fisik.
- 4 Konsolidasi domain partisipasi dan kepemimpinan melalui dukungan kelembagaan organisasi kepemudaan, pembentukan youth council, serta skema pembiayaan berbasis hibah untuk proyek sosial yang digerakkan oleh pemuda.
- 5 Penguatan tata kelola IPP dengan menjadikannya indikator kinerja lintas-perangkat daerah, membangun sistem data pipeline antardomain, melakukan audit kontribusi program terhadap indikator IPP, serta menerapkan monitoring kuartalan berbasis indikator antara.

IPP 2021–2024 di Kota Tangerang Selatan menegaskan adanya kemajuan yang konsisten menuju batas atas kategori “sedang”. Tantangan utama terletak pada bagaimana memperluas akselerasi dari domain partisipasi–kepemimpinan ke domain kesempatan kerja, pendidikan, serta kesehatan–kesejahteraan. Dengan penguatan tata kelola berbasis bukti, intervensi kebijakan yang terintegrasi, dan perhatian khusus pada kelompok pemuda rentan, pencapaian IPP di atas 62–63 pada tahun 2029 merupakan target yang realistis sekaligus strategis untuk mewujudkan pemuda sebagai agen pembangunan daerah.

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	52,31	53,43	54,53	55,86

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan 2021-2024

2 Komposisi Penduduk

Analisa kependudukan berdasarkan usia disajikan dalam Tabel 2.82. Jika ditinjau berdasarkan komposisi penduduk menurut usia, terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang meningkat, lalu pada tahun 2024 persentasenya menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Kota Tangerang Selatan mulai memasuki masa penuaan penduduk (*aging polpulation*). Hal tersebut juga ditandai tren persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) yang mengalami peningkatan. Pengarusutamaan inklusifitas perlu dilaksanakan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan, seperti perlindungan sosial utk lansia dan pemberdayaan ekonomi bagi lansia yang masih memiliki kemampuan bekerja. Aging population juga dapat membuka peluang kebutuhan tenaga kerja perawatan (caregiver) bagi calon tenaga kerja lokal.

Walaupun mulai tahun 2024 mengalami penurunan, komposisi penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk Kota Tangerang Selatan. Persentase penduduk usia produktif yang rata-rata mencapai 71%, menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi. Gambaran ini juga diperkuat dengan rasio ketergantungan di Kota Tangerang Selatan yang berada dibawah nilai 66. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui peningkatan kualitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing global sehingga penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan dapat menjadi sumber tenaga kerja profesional yang dapat diserap oleh pasar kerja Nasional dan Dunia.

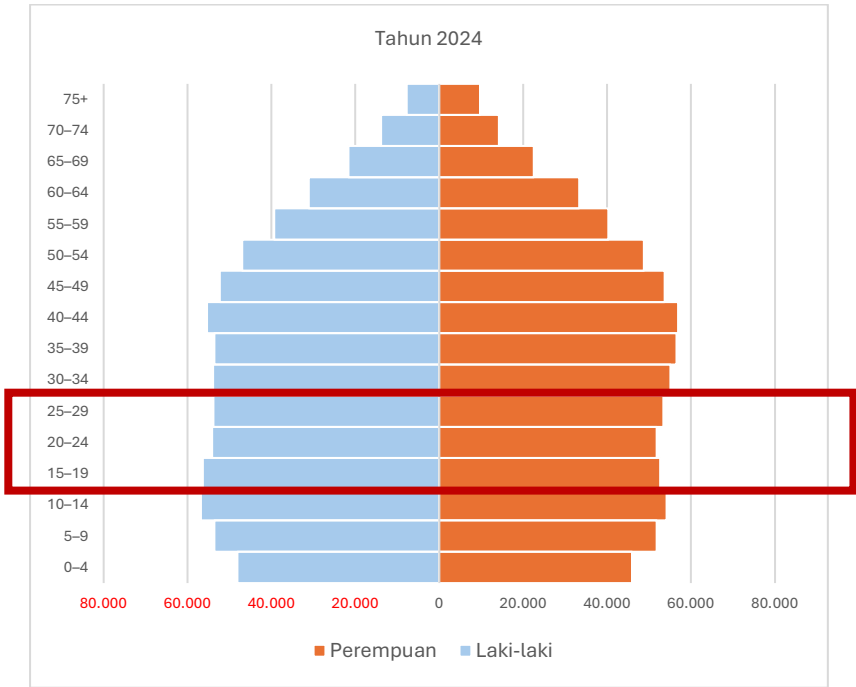
Tabel 2. 9. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Periode Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	324.830	321.740	318.470	314.930	310.460
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	24,04%	23,56%	23,10%	22,63%	22,18%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	64.630	70.580	76.700	83.050	89.770

Kelompok Umur	Periode Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	4,78%	5,17%	5,56%	5,97%	6,41%
Penduduk Usia Produktif (15- 65 Tahun) (jiwa)	961.870	973.060	983.580	993.690	999.300
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,18%	71,27%	71,34%	71,40%	71,40%
Angka Ketergantungan	40,49	40,32	40,18	40,05	40,05

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025, diolah

Komposisi penduduk berdasarkan usia selama tahun 2024 membentuk piramida tipe stasioner sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.35. Piramida penduduk stasioner menggambarkan kondisi demografis yang stabil dengan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang, dimana pada jangka panjang, demografis di Kota Tangerang Selatan akan mengalami penuaan penduduk dan penurunan angkatan kerja pada usia produktif.



Gambar 2. 3. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Komposisi proyeksi penduduk berdasarkan usia sebagaimana disajikan dalam Tabel. 2.9 memperlihatkan persentase penduduk usia produktif di Kota

Tangerang Selatan mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2025-2029. Sementara itu, proyeksi persentase penduduk lansia meningkat pada tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2029 diproyeksikan penduduk lanjut usia akan mencapai 9,17% dari proyeksi total penduduk Kota Tangerang Selatan.

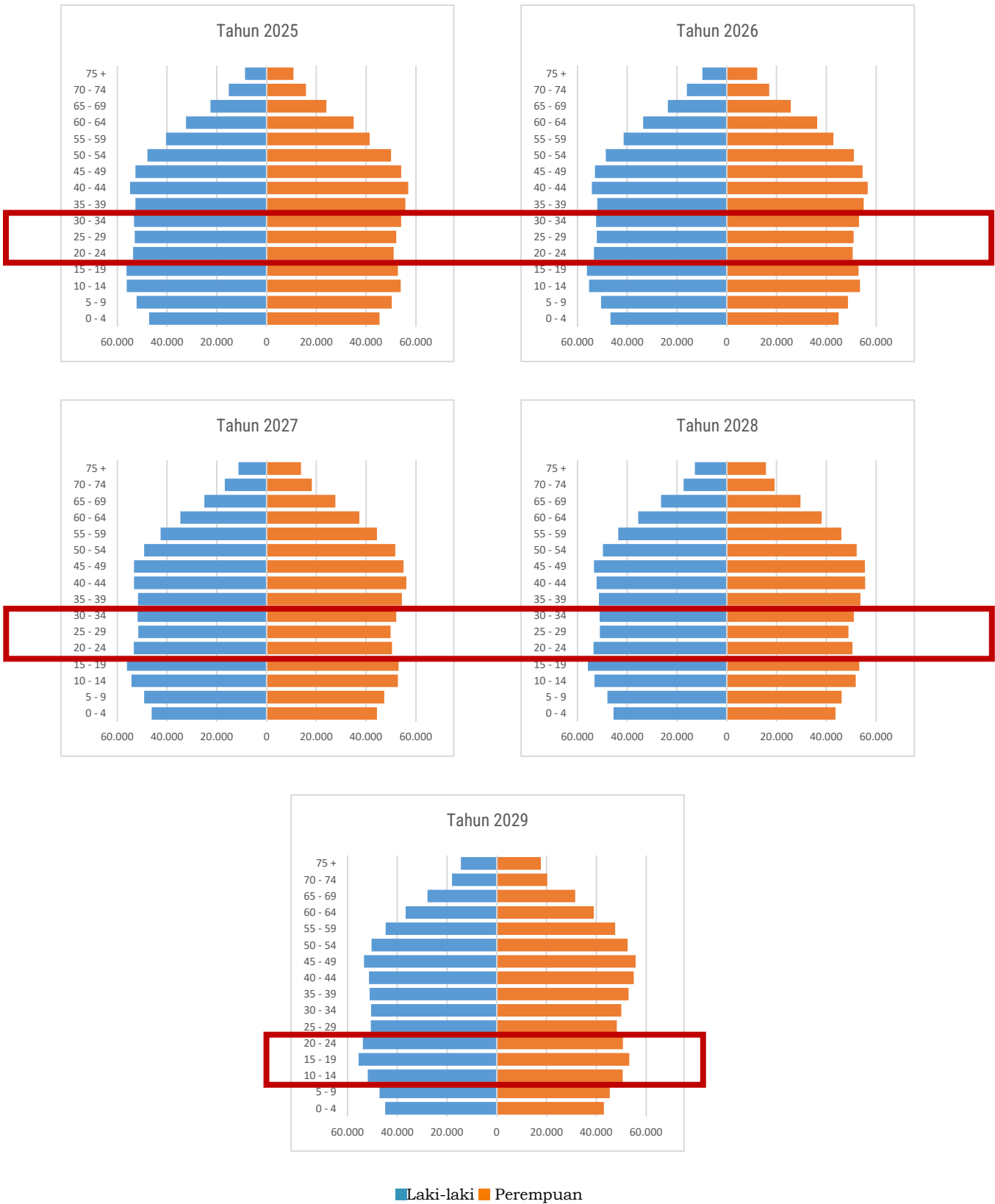
Walaupun secara komposisi persentase penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk, namun dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan di Kota Tangerang Selatan hingga mencapai 41,14% pada tahun 2029. Peningkatan angka ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa tanggungan beban untuk menghidupi penduduk usia non-produktif oleh penduduk usia produktif meningkat. Persentase penduduk usia produktif yang masih di atas 60% menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan 2024-2029 masih mengalami bonus demografi pada tahun 2025-2029.

Tabel 2. 10. Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Periode Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	305.140	299.610	293.970	288.340	282.790
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	21,76%	21,32%	20,88%	20,43%	19,98%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	96.890	104.560	112.680	121.130	129.720
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	6,91%	7,44%	8,00%	8,58%	9,17%
Penduduk Usia Produktif (15- 65 Tahun) (jiwa)	1.000.150	1.000.890	1.001.520	1.002.070	1.002.670
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,33%	71,23%	71,12%	70,99%	70,85%
Angka Ketergantungan	40,20%	40,38%	40,60%	40,86%	41,14%

Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

Dalam periode 2024–2029, struktur usia penduduk Kota Tangerang Selatan yang masih berbentuk piramida stasioner mencerminkan adanya komposisi penduduk muda yang cukup besar, sehingga memberikan peluang bagi optimalisasi pembangunan pemuda. Kondisi ini penting diperhatikan karena dalam beberapa tahun mendatang, proyeksi demografi menunjukkan pergeseran menuju piramida konstruktif, di mana proporsi penduduk usia dewasa dan lanjut usia akan semakin dominan. Transisi ini menegaskan urgensi untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dengan memperkuat kualitas sumber daya pemuda sejak dini. Pemuda merupakan kelompok usia strategis yang akan menjadi penentu daya saing dan ketahanan sosial-ekonomi daerah, sehingga keterlambatan dalam meningkatkan kapasitas mereka berpotensi menyebabkan hilangnya peluang pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan pemuda di Kota Tangerang Selatan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, serta partisipasi sosial-politik, agar mereka mampu menghadapi dinamika transformasi demografi dan berperan sebagai motor pembangunan berkelanjutan.

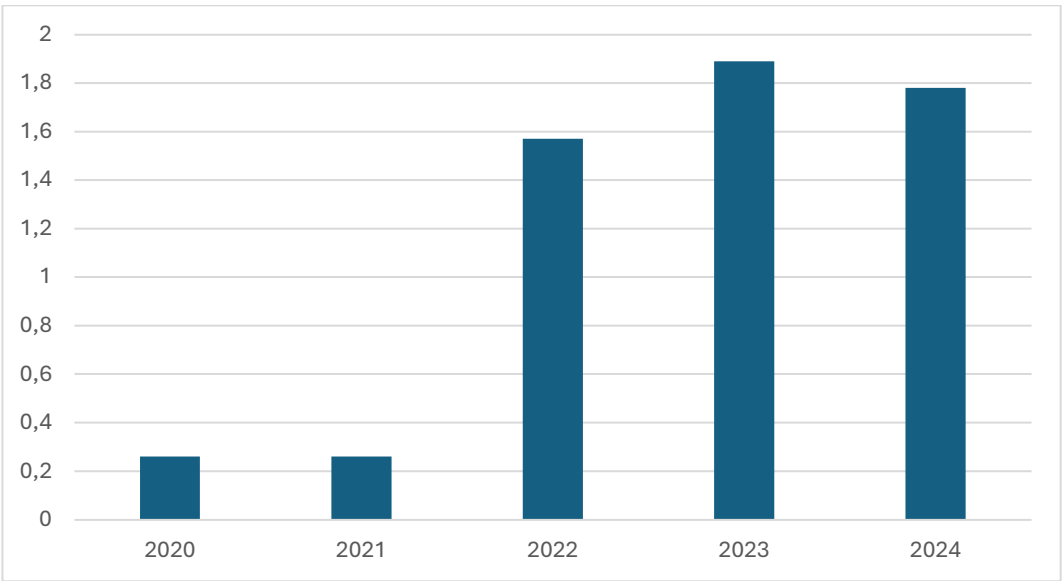


Gambar 2. 4. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, khususnya indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, terlihat adanya dinamika perkembangan yang

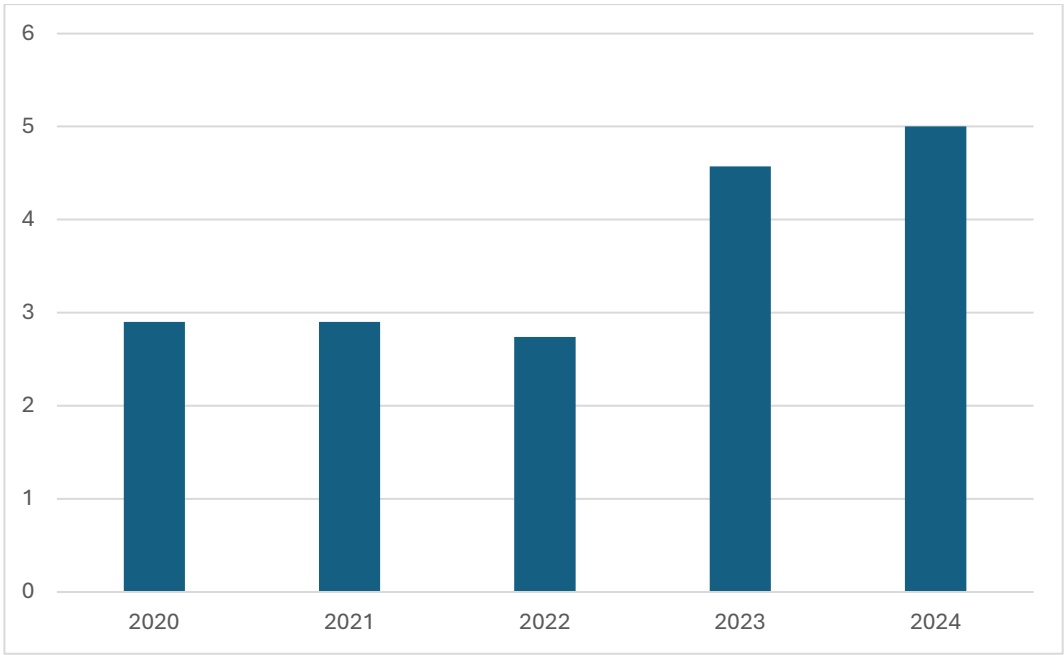
cukup signifikan di Kota Tangerang Selatan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indikator masih berada pada angka 0,26 yang menunjukkan sangat rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam aktivitas ekonomi mandiri. Namun demikian, sejak tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup tajam hingga mencapai 1,57, bahkan meningkat lagi menjadi 1,89 pada tahun 2023. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari adanya intervensi kebijakan, dukungan ekosistem kewirausahaan, maupun meningkatnya minat pemuda terhadap aktivitas ekonomi produktif pasca pemulihan pandemi COVID-19. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 1,78, yang dapat mencerminkan adanya tantangan keberlanjutan program atau keterbatasan akses pemuda terhadap sumber daya usaha, seperti modal, jaringan pasar, maupun pendampingan bisnis.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian yang masih relatif rendah secara absolut menegaskan urgensi penguatan kebijakan pembangunan pemuda. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tidak hanya memerlukan dukungan dari sisi pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan akses pembiayaan, tetapi juga ekosistem kolaboratif yang menghubungkan pemuda dengan pasar, sektor swasta, serta lembaga keuangan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program kepemudaan, tetapi juga cerminan dari seberapa jauh Kota Tangerang Selatan mampu memanfaatkan potensi pemuda sebagai aktor ekonomi kreatif dan mandiri yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2. 5.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

indikator kedua yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan memperlihatkan tren yang relatif lebih stabil dan meningkat. Dari 2,9 pada tahun 2020–2021, indikator ini sempat turun sedikit ke 2,74 pada 2022, tetapi kemudian melonjak cukup tajam ke 4,57 pada 2023 dan meningkat lagi menjadi 5 pada 2024. Perkembangan ini mengindikasikan adanya revitalisasi gerakan kepemudaan dan semakin kuatnya keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial, baik melalui organisasi formal maupun komunitas berbasis masyarakat. Kenaikan ini juga dapat diartikan sebagai bukti tumbuhnya kesadaran pemuda akan pentingnya partisipasi sosial dan kolektivitas, yang sejalan dengan tren partisipasi digital dan gerakan komunitas di perkotaan.



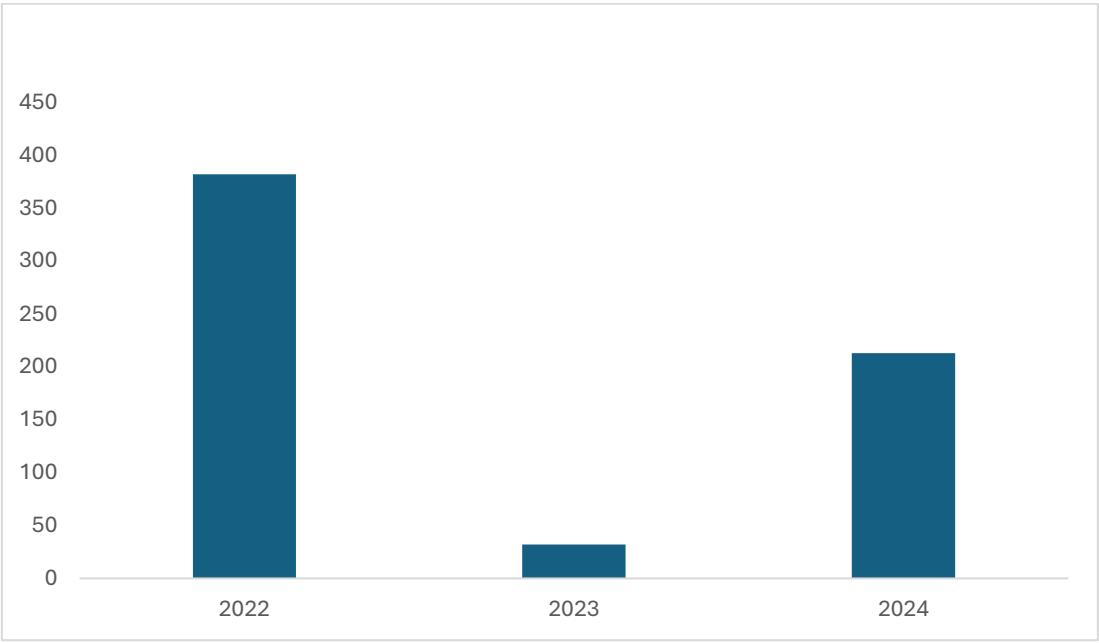
Gambar 2. 6.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Capaian indikator peningkatan prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang cukup mencolok dan mencerminkan ketidakstabilan sistem pembinaan prestasi daerah. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat total 382 medali dari berbagai ajang kejuaraan, yang merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Tahun tersebut menjadi puncak prestasi yang signifikan dengan perolehan 99 medali emas, 120 medali perak, dan 163 medali perunggu yang sebagian besar berasal dari ajang Porda/Porprov. Namun, capaian ini menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 32 medali secara total, dan baru kembali meningkat pada tahun 2024 dengan 213 medali, terdiri dari 63 emas, 63 perak, 79 perunggu dari ajang

Porda/Porprov serta tambahan 8 medali (2 emas, 4 perak, 2 perunggu) dari Popnas.

Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan belum menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan. Lonjakan luar biasa pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan momentum pelaksanaan Porprov pasca-pandemi COVID-19, yang membuka kembali ruang kompetisi bagi para atlet setelah periode pembatasan aktivitas olahraga. Sebaliknya, penurunan drastis pada 2023 mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem pembinaan atlet, terutama dalam hal kesinambungan pelatihan, regenerasi atlet, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas yang tidak stabil antar tahun.

Meskipun capaian pada tahun 2024 menunjukkan tanda pemulihan, data tersebut sekaligus menegaskan bahwa sistem pembinaan olahraga daerah masih bersifat reaktif terhadap momentum kompetisi besar, bukan hasil dari proses pembinaan yang terstruktur. Untuk itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih terpadu dan berorientasi jangka panjang, meliputi: (1) penguatan manajemen pembinaan atlet dan pelatih, (2) pemetaan potensi cabang olahraga unggulan, (3) pengembangan infrastruktur pelatihan berbasis wilayah, serta (4) peningkatan kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan sektor swasta.



Gambar 2. 7.Peningkatan prestasi olahraga

II.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan mencerminkan keterkaitan erat antara pengembangan kapasitas pemuda dengan pembangunan ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Pemuda menjadi sasaran utama karena berperan sebagai agen perubahan dan potensi pembangunan, baik melalui jalur pendidikan, organisasi, kewirausahaan, maupun prestasi. Dengan fokus pada pelajar, mahasiswa, serta komunitas kepemudaan, Dispora tidak hanya membina aspek kognitif dan keterampilan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepemimpinan, jiwa wirausaha, dan keteladanan prestasi.

Pada ranah olahraga, sasaran meliputi atlet dari berbagai tingkatan, baik pelajar, profesional, amatir, hingga atlet disabilitas. Keberadaan pusat pelatihan daerah (Puslatda) maupun sekolah khusus olahraga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing atlet secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal ini menegaskan bahwa layanan Dispora memiliki dimensi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul.

Selain itu, perhatian terhadap pelatih, instruktur kebugaran, wasit, juri, dan pengelola sarana olahraga mencerminkan orientasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada atlet, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya. Hal ini penting karena kualitas tenaga keolahragaan akan menentukan standar pembinaan, kualitas kompetisi, serta pengelolaan fasilitas olahraga.

Lebih jauh, keberpihakan terhadap masyarakat umum melalui dukungan bagi komunitas olahraga rekreasi, klub lokal, dan pecinta olahraga menunjukkan bahwa Dispora mengakomodasi dimensi partisipatif dan inklusif dalam pembangunan olahraga. Hal ini selaras dengan paradigma olahraga sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk kesehatan, rekreasi, dan solidaritas sosial.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta instansi terkait seperti KONI, KORMI, dan NPC memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun tata kelola kepemudaan dan olahraga. Dengan pola ini, Dispora berperan sebagai katalisator dalam menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat komunitas, pendidikan, maupun organisasi olahraga. Oleh karena itu, strategi pengembangan sasaran Dispora perlu diarahkan pada integrasi kebijakan, keberlanjutan program, serta penguatan jejaring kelembagaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara luas, inklusif, dan berkesinambungan.

Tabel 2. 8. Identifikasi dan Pemetaan Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No	Kelompok Sasaran	Sub-kelompok
1	Pemuda	Pelajar dan Mahasiswa
		Organisasi Kepemudaan (KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dll.)
		Pemuda Wirausaha
		Pemuda Berprestasi
2	Atlet dan Calon Atlet	Atlet Pelajar dan Mahasiswa
		Atlet Profesional dan Amatir
		Atlet Disabilitas
		Atlet di Puslatda atau Sekolah Khusus Olahraga
3	Pelatih dan Tenaga Keolahragaan	Pelatih Olahraga
		Instruktur Kebugaran
		Wasit dan Juri
		Pengelola Sarana Olahraga
4	Masyarakat Umum	Pecinta dan Komunitas Olahraga
		Masyarakat yang aktif dalam kegiatan olahraga rekreasi dan kebugaran
		Komunitas/klub olahraga lokal

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Jaringan kemitraan yang dibangun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan merefleksikan model collaborative governance yang komprehensif. Mitra internal, seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Dinas Pendidikan, berperan dalam memastikan sinergi lintas sektor pembangunan daerah, khususnya pada dimensi perencanaan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa isu kepemudaan dan olahraga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan integratif dari perangkat daerah lain.

Sementara itu, mitra eksternal seperti KONI, KORMI, NPC, dan KNPI mengisi fungsi strategis dalam pembinaan prestasi, pengembangan olahraga rekreasi,

pemberdayaan organisasi kepemudaan, hingga fasilitasi kegiatan kewirausahaan. Keterlibatan Pramuka dan Forum Kewirausahaan Pemuda memperluas cakupan pembinaan, tidak hanya berfokus pada aspek olahraga, tetapi juga penguatan karakter, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi.

Dari perspektif akademik, keberadaan mitra internal dan eksternal ini dapat dipandang sebagai upaya membangun ecosystem approach dalam layanan kepemudaan dan olahraga. Kolaborasi lintas aktor memungkinkan terwujudnya pelayanan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok sasaran pemuda dan masyarakat.

Tabel 2. 9. Identifikasi dan Pemetaan Mitra Perangkat Daerah

Jenis Mitra	Mitra	Peran
Internal	Bappelitbangda	Perencanaan program, sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
	Dinas Kesehatan	Dukungan kesehatan atlet dan pemuda, layanan kesehatan olahraga.
	DP3AP2KB	Perlindungan pemuda, kesetaraan gender, serta penguatan keluarga.
	Dinas Sosial	Dukungan sosial bagi pemuda rentan dan kelompok disabilitas.
	Dinas Koperasi UKM	Pemberdayaan pemuda wirausaha melalui pelatihan dan fasilitasi usaha.
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Integrasi program kepemudaan dan olahraga di sekolah dan kampus.
	Dinas Tenaga Kerja	Penyediaan akses kerja dan pelatihan vokasi bagi pemuda.
	Kecamatan	Implementasi program olahraga dan kepemudaan di tingkat wilayah.

Jenis Mitra	Mitra	Peran
	Kelurahan	Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat dan komunitas pemuda lokal.
Eksternal	KONI Kota Tangerang Selatan	Pembinaan atlet, penyelenggaraan kejuaraan, dan pengembangan prestasi olahraga.
	KNPI Kota Tangerang Selatan	Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan penguatan kepemimpinan pemuda.
	KORMI Kota Tangerang Selatan	Pengembangan olahraga rekreasi dan partisipasi masyarakat umum.
	NPC Kota Tangerang Selatan	Pembinaan atlet disabilitas dan pengembangan olahraga inklusif.
	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	Pembentukan karakter dan kepemimpinan pemuda berbasis kegiatan kepanduan.
	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP)	Fasilitasi jaringan usaha, mentoring, dan dukungan kewirausahaan pemuda.

II.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Hingga saat ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan belum memperoleh dukungan secara langsung dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja. Tidak adanya keterlibatan BUMD menunjukkan masih terdapat ruang yang dapat dioptimalkan dalam memperluas sumber daya pendukung, baik berupa pendanaan, penyediaan sarana prasarana, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

II.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Pemetaan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan keterlibatan lintas sektor yang cukup luas. Kerjasama internal dengan Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, dan Dinas

Kesehatan memastikan bahwa program kepemudaan dan olahraga sejalan dengan agenda pembangunan daerah, terintegrasi dalam sistem pendidikan, serta didukung aspek kesehatan dan keselamatan.

Di sisi lain, kerjasama eksternal dengan organisasi kepemudaan (KNPI), olahraga (KONI, KORMI, NPC), dan gerakan pendidikan nonformal (Pramuka) menunjukkan upaya untuk memperluas jangkauan pembinaan melalui partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan governance network yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam penyelenggaraan layanan publik.

Namun demikian, analisis juga menemukan adanya ruang penguatan pada dimensi kerjasama dengan sektor swasta, BUMD, maupun jejaring internasional. Ketiadaan kerjasama formal dengan BUMD (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) dan terbatasnya jejaring dengan lembaga luar negeri menjadi tantangan strategis dalam memperluas sumber daya dan peluang internasionalisasi kegiatan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2. 10.Identifikasi dan Pemetaan Kerjasama Perangkat Daerah

No	Jenis Kerjasama	Mitra	Bentuk Kerjasama	Manfaat Strategis
1	Internal Pemerintah Daerah	Bappelitbangda	Sinkronisasi program pembangunan kepemudaan dan olahraga	Integrasi dalam RPJMD/RKPD serta dukungan anggaran.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di sekolah	Mendorong regenerasi atlet dan pembentukan karakter pemuda.
		Dinas Kesehatan	Dukungan layanan kesehatan olahraga	Menjamin kesehatan dan keselamatan atlet/pemuda.
2	Eksternal Lokal	KONI Tangsel	Pembinaan prestasi olahraga	Peningkatan kualitas dan capaian atlet daerah.

No	Jenis Kerjasama	Mitra	Bentuk Kerjasama	Manfaat Strategis
		KNPI Tangsel	Pemberdayaan organisasi kepemudaan	Penguatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi pemuda.
		KORMI Tangsel	Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi olahraga berbasis komunitas.
3	Eksternal Nasional	NPC Indonesia	Pengembangan olahraga disabilitas	Penguatan inklusivitas dan penghargaan keberagaman.
		Kwartir Cabang Pramuka	Pendidikan kepemimpinan pemuda	Membentuk kedisiplinan dan karakter tangguh.
		Forum Kewirausahaan Pemuda	Kegiatan kewirausahaan dan jaringan bisnis pemuda	Mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.

II.2 Permasalahan Berkaitan dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama yang dihadapi Kota Tangerang Selatan berkaitan dengan rendahnya daya saing dan kemandirian pemuda. Kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya proses pembinaan dan pengembangan kepemudaan, rendahnya partisipasi pemuda dalam kewirausahaan, serta terbatasnya bentuk apresiasi terhadap pemuda yang berprestasi. Minimnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah juga mengindikasikan bahwa potensi besar generasi muda belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif. Dari sisi kebijakan, ketiadaan payung hukum, masterplan, maupun rencana aksi daerah kepemudaan menyebabkan pembangunan di sektor ini berjalan tanpa arah yang jelas. Situasi tersebut diperburuk dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat ruang ekspresi, kreativitas, dan pengembangan kapasitas pemuda.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam pengembangan kepramukaan di Kota Tangerang Selatan. Kapasitas dan kualitas kepramukaan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh keterbatasan jumlah dan mutu pembina pramuka, pola pembinaan yang bersifat konvensional, serta rendahnya kepedulian pramuka terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Minimnya penghargaan bagi anggota yang berprestasi semakin menurunkan motivasi internal. Dari sisi kelembagaan, belum tersedianya payung hukum maupun masterplan kepramukaan menyebabkan arah pembangunan berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti bumi perkemahan, sekretariat, dan gedung pelatihan turut menjadi hambatan dalam mendukung kegiatan kepramukaan yang seharusnya berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Dalam bidang olahraga, tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda. Prestasi olahraga Kota Tangerang Selatan masih belum menunjukkan hasil optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan kualitas pembinaan atlet dan minimnya pelatih yang tersertifikasi. Apresiasi terhadap atlet, baik selama masa aktif maupun setelah pensiun, juga belum diberikan secara memadai, sehingga memengaruhi motivasi untuk berprestasi secara berkelanjutan. Dari aspek regulasi, ketiadaan kerangka hukum maupun masterplan olahraga mengakibatkan arah pembangunan olahraga daerah belum terstruktur dengan baik. Lebih jauh, keterbatasan fasilitas olahraga yang memenuhi standar, minimnya kerjasama dengan organisasi atau institusi terkait, serta belum adanya sekolah olahraga menjadi faktor penghambat dalam upaya mencetak atlet unggul yang mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.

Secara keseluruhan, ketiga permasalahan tersebut menunjukkan pola yang serupa, yaitu lemahnya fondasi kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur dalam pembangunan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan. Akar masalah yang bersifat struktural ini memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, potensi besar pemuda, kepramukaan, dan olahraga di Kota Tangerang Selatan berisiko tidak dapat dioptimalkan sebagai penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan..

Tabel 2. 11. Identifikasi dan Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya daya saing dan kemandirian pemuda di Kota Tangerang Selatan	Rendahnya daya saing dan kemandirian pemuda	Belum optimalnya kemandirian dan kewirausahaan pemuda
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan
			Belum optimalnya penghargaan bagi pemuda berprestasi
			Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Belum tersedianya kebijakan kepemudaan	Belum tersedianya payung hukum tentang kepemudaan
			Belum tersedianya <i>masterplan dan Rencana Aksi Daerah(RAD)</i> kepemudaan
			Belum tersedianya Rencana Aksi daerah tentang kepemudaan
		Kurangnya sarana prasarana kepemudaan	Belum tersedianya sarana prasarana kepemudaan
2	Masih belum optimalnya kapasitas dan kualitas kepramukaan di Kota Tangerang Selatan.	Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pembina pramuka
			Pola pembinaan pramuka masih konvensional.
			Belum optimalnya kepedulian pramuka dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya penghargaan bagi pramuka berprestasi
		Belum tersedianya Kebijakan Kepramukaan	Belum tersedianya payung hukum tentang kepramukaan
			Belum tersedianya <i>masterplan</i> kepramukaan
		Kurangnya Sarana Prasarana Kepramukaan	Belum tersedianya bumi perkemahan
			Belum tersedianya sekretariat kepramukaan dan gedung diklat
3	Masih belum optimalnya prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan	Rendahnya prestasi keolahragaan	Belum optimalnya pelatih yang tersertifikasi
			Belum optimalnya penghargaan bagi atlet berprestasi dari saat menjadi atlet hingga pasca menjadi atlet
		Belum tersedianya Kebijakan Keolahragaan	Belum tersedianya regulasi tentang keolahragaan
			Belum tersedianya <i>masterplan</i> pengembangan olahraga
		Kurangnya sarana prasaarana keolahragaan	Belum tersedianya fasilitas olahraga terstandar
		Belum optimalnya kerjasama dengan organisasi dan Institusi	Kurang optimalnya kerjasama antar pihak
			Belum tersedianya sekolah olahraga

II.3 Isu Strategis Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kerangka pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan, terdapat sejumlah isu strategis yang menuntut perhatian serius, mulai dari optimalisasi momentum bonus demografi, ketimpangan capaian antar-domain pembangunan pemuda, rendahnya kemandirian ekonomi pemuda, hingga belum optimalnya sistem pembinaan olahraga dan kepramukaan secara berkelanjutan. Isu-isu tersebut muncul dari dinamika kependudukan, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), keterbatasan ekosistem kewirausahaan, serta belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan perlu dirancang secara lebih holistik, terintegrasi lintas sektor, dan berbasis data agar mampu menjawab tantangan struktural sekaligus mengoptimalkan potensi generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

1 Optimalisasi Momentum Bonus Demografi

Kota Tangerang Selatan saat ini berada pada fase transisi demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari 71 persen pada periode 2020–2024. Secara teoritis, kondisi ini dikenal sebagai bonus demografi, yaitu peluang bagi suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dominasi angkatan kerja produktif. Akan tetapi, peluang tersebut tidak hadir secara otomatis; ia hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja yang memadai, serta ekosistem pembangunan yang kondusif. Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan adanya tren peningkatan, dari 52,31 pada tahun 2021 menjadi 55,86 pada tahun 2024. Meskipun capaian ini konsisten positif, kategorinya masih berada pada tingkat “sedang”, sehingga potensi bonus demografi belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif daerah.

Tantangan terbesar dalam optimalisasi bonus demografi terletak pada keterbatasan kesempatan kerja layak dan inklusif bagi pemuda. Proses transisi dari sekolah ke dunia kerja masih menghadapi hambatan struktural, yang tercermin dari tingginya potensi NEET (Not in Employment, Education, or Training) serta meningkatnya angka pengangguran terselubung. Di sisi lain, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri baru mencapai 1,78 persen pada tahun 2024, menandakan masih terbatasnya akses terhadap modal,

inkubasi wirausaha, jaringan pasar, maupun pembiayaan yang ramah pemuda. Tanpa intervensi yang tepat, momentum bonus demografi justru berisiko berubah menjadi demographic burden, yaitu kondisi ketika angkatan kerja produktif tidak terserap dengan optimal oleh pasar kerja, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi baru.

Selain aspek ketenagakerjaan, kualitas pendidikan juga menjadi faktor penentu. Walaupun angka partisipasi sekolah relatif tinggi, kesenjangan keterampilan (skills gap) antara lulusan dengan kebutuhan pasar kerja masih signifikan, khususnya di bidang digital, teknologi, dan industri kreatif. Literasi dasar seperti literasi-numerasi masih menjadi persoalan di kalangan pelajar, sementara keterampilan abad ke-21—problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas—belum sepenuhnya tertanam dalam sistem pendidikan. Tanpa perluasan program vokasional, sertifikasi keterampilan, dan penguatan literasi digital, pemuda Tangerang Selatan berisiko kehilangan daya saing, baik di pasar kerja nasional maupun global.

Optimalisasi bonus demografi juga tidak dapat dilepaskan dari kesehatan fisik dan mental pemuda. Masalah kesehatan reproduksi remaja, gizi, serta meningkatnya prevalensi gangguan kesehatan mental di wilayah perkotaan menjadi ancaman serius bagi produktivitas generasi muda. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan ramah pemuda maupun layanan konseling psikologis menambah kompleksitas masalah ini. Ditambah dengan gaya hidup urban yang cenderung sedentari, potensi lahirnya generasi dengan produktivitas rendah semakin menguat apabila tidak ada perbaikan yang signifikan di bidang kesehatan.

Di sisi lain, aspek partisipasi dan kepemimpinan pemuda menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peningkatan partisipasi dalam organisasi kepemudaan dari 2,9 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2024 mencerminkan adanya energi sosial yang dapat dimobilisasi. Namun, partisipasi ini perlu ditopang oleh penguatan kapasitas kepemimpinan, literasi politik, serta akses yang lebih luas terhadap proses perumusan kebijakan publik. Tanpa penguatan tersebut, keterlibatan pemuda dikhawatirkan hanya bersifat seremonial dan belum mampu memberikan kontribusi substantif bagi pembangunan daerah.

Lebih lanjut, capaian IPP yang bersifat agregat cenderung menyamarkan kesenjangan antar kelompok pemuda. Mereka yang berasal dari keluarga

miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda di wilayah dengan keterbatasan layanan masih menghadapi risiko ketertinggalan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi bonus demografi harus berbasis pada data terpilah (disaggregated data) dan kebijakan afirmatif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan tidak menimbulkan eksklusi sosial.

Kendala lain yang perlu dicermati adalah lemahnya koordinasi lintas sektor. Pembangunan pemuda sering terfragmentasi dalam program sektoral—baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun organisasi kepemudaan—yang tidak selalu terhubung dengan target peningkatan IPP secara sistematis. Tanpa tata kelola yang integratif, pembangunan pemuda akan bersifat parsial dan kurang mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, IPP sebaiknya dijadikan indikator lintas perangkat daerah dengan mekanisme pemantauan berkala, audit kontribusi program, serta sistem data terpadu yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Jika tren peningkatan IPP sebesar +1,18 poin per tahun dapat dipertahankan, maka pada 2029 Kota Tangerang Selatan diproyeksikan mencapai IPP sekitar 61–63, atau masuk dalam kategori “tinggi”. Namun, pencapaian ini sangat bergantung pada efektivitas intervensi kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Apabila momentum ini terlewat, bonus demografi berpotensi hilang bersamaan dengan transisi menuju masyarakat menua (aging population), di mana proporsi penduduk lanjut usia diproyeksikan mencapai 9,17 persen pada 2029. Sebaliknya, jika dimanfaatkan dengan tepat, bonus demografi dapat menjadikan pemuda Tangerang Selatan sebagai tenaga kerja unggul berdaya saing global sekaligus penggerak utama inovasi dalam perekonomian kreatif perkotaan.

2 Ketimpangan Domain Pembangunan Pemuda

Ketimpangan antar domain pembangunan pemuda di Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya dinamika pembangunan yang belum berjalan seimbang. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memang mengalami peningkatan, tetapi lonjakan tersebut lebih banyak ditopang oleh aspek partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang bagi pemuda untuk berorganisasi, terlibat dalam kegiatan sosial, maupun mengambil peran kepemimpinan relatif terbuka dan berkembang. Namun, capaian positif ini belum diikuti secara proporsional oleh perbaikan dalam domain kesempatan kerja, pendidikan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Ketidakseimbangan ini

menandakan bahwa kualitas pembangunan pemuda masih parsial dan berpotensi melahirkan kesenjangan dalam jangka panjang.

Dalam bidang kesempatan kerja, transisi sekolah ke dunia kerja masih menjadi titik kritis. Tingginya potensi NEET (Not in Employment, Education, or Training) mengindikasikan bahwa tidak sedikit pemuda yang tertinggal dari arus produktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, rendahnya akses terhadap pelatihan vokasi, serta terbatasnya jembatan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja. Bila tidak ditangani secara serius, fenomena ini akan memperbesar angka pengangguran muda dan mengurangi daya saing pemuda Tangerang Selatan di tengah kompetisi global maupun regional.

Dari sisi pendidikan, tantangan literasi dan numerasi menjadi perhatian penting. Meskipun akses pendidikan cukup luas, kualitas capaian belajar masih relatif rendah, sehingga pemuda kesulitan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan adaptif yang dibutuhkan dalam era digital. Hal ini semakin kompleks ketika dunia kerja menuntut kompetensi baru seperti keterampilan teknologi informasi, komunikasi, dan problem solving. Ketimpangan antara partisipasi dan kualitas pendidikan ini menciptakan situasi di mana pemuda mampu berorganisasi dan tampil sebagai pemimpin, tetapi belum memiliki fondasi kompetensi akademik dan keterampilan teknis yang kuat untuk mendukung kinerja mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, isu kesehatan–kesejahteraan, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan mental, juga masih menjadi tantangan besar. Minimnya literasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, maupun penyebaran penyakit menular seksual. Di sisi lain, tekanan sosial, akademik, dan pekerjaan memicu tingginya masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi di kalangan pemuda. Jika aspek ini tidak mendapat perhatian memadai, maka produktivitas dan kualitas hidup pemuda akan terus menurun, sekalipun peluang partisipasi dan kepemimpinan terbuka lebar.

Dengan demikian, isu ketimpangan domain pembangunan pemuda menuntut adanya kebijakan yang lebih terintegrasi dan lintas sektor. Upaya meningkatkan IPP tidak cukup hanya dengan memperluas ruang partisipasi dan kepemimpinan, tetapi harus diimbangi dengan penguatan kualitas pendidikan, peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, serta

penyediaan layanan kesehatan komprehensif termasuk kesehatan mental. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas, dan keluarga menjadi kunci agar pembangunan pemuda berlangsung holistik, seimbang, dan berkelanjutan.

3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pemuda

Rendahnya kemandirian ekonomi pemuda, yang tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (sekitar 1,78% pada tahun 2024), merupakan tantangan serius dalam pembangunan kepemudaan. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan peluang wirausaha, tetapi juga memperlihatkan lemahnya ekosistem pendukung bagi pemuda untuk berperan sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, rendahnya kemandirian ekonomi pemuda berpotensi menghambat proses regenerasi pelaku ekonomi dan memperlebar ketimpangan antar generasi dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kemandirian ekonomi pemuda adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak pemuda yang memiliki ide inovatif namun terhambat untuk memulai usaha karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif perbankan maupun lembaga keuangan formal. Akses terhadap pembiayaan alternatif, seperti dana hibah, modal ventura, atau skema kredit usaha pemuda, juga masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif dalam mengintegrasikan pemuda dengan sistem keuangan inklusif yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik generasi muda.

Selain aspek permodalan, inkubasi wirausaha yang berperan dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda juga masih belum optimal. Lembaga pelatihan, program inkubasi bisnis, maupun pusat kewirausahaan di perguruan tinggi sering kali belum terhubung secara langsung dengan kebutuhan pasar dan ekosistem bisnis nyata. Akibatnya, meskipun pelatihan dilakukan, daya saing usaha rintisan pemuda tidak mampu bertahan lama. Perlu adanya penguatan ekosistem inkubasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis agar pemuda dapat memperoleh pendampingan menyeluruh dari tahap ide, prototipe, hingga komersialisasi.

Jaringan pasar yang terbatas juga menjadi faktor penghambat kemandirian ekonomi pemuda. Dalam era digital, seharusnya pemuda memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar global melalui e-commerce dan platform digital. Namun, hambatan berupa keterbatasan literasi digital, biaya logistik, dan regulasi perdagangan sering kali membatasi jangkauan usaha pemuda. Penguatan literasi digital, fasilitasi akses ke pasar global, serta penyediaan infrastruktur logistik yang terjangkau dan efisien menjadi strategi kunci dalam membuka ruang bagi pemuda untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Secara lebih luas, rendahnya kemandirian ekonomi pemuda merefleksikan belum terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Ekosistem ini mencakup dukungan kebijakan yang kondusif, jaringan komunitas usaha yang kolaboratif, insentif fiskal, serta keberadaan mentor yang mampu mendorong pemuda berani mengambil risiko dalam membangun usaha. Tanpa ekosistem yang inklusif, pemuda cenderung memilih jalur pekerjaan konvensional dengan risiko pengangguran yang lebih tinggi, daripada menempuh jalur wirausaha. Oleh karena itu, pembangunan kemandirian ekonomi pemuda perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah dan nasional, mengingat perannya yang strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan daya saing generasi muda.

4 Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkelanjutan

Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Tangerang Selatan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam kerangka pembangunan daerah. Fluktuasi prestasi atlet daerah menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini belum mampu menghasilkan capaian yang konsisten, baik di tingkat regional maupun nasional. Kondisi ini menandakan bahwa proses pembinaan masih bersifat parsial, belum berkesinambungan, serta kurang ditopang oleh sistem yang terstruktur dari hulu ke hilir. Dalam konteks kota yang terus berkembang dengan dinamika sosial dan demografis yang kompleks, keberhasilan pembangunan olahraga semestinya tidak hanya diukur dari prestasi kompetitif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesehatan, kohesi sosial, dan pembentukan karakter generasi muda.

Minimnya jumlah pelatih tersertifikasi menjadi hambatan mendasar bagi peningkatan kualitas pembinaan olahraga. Tanpa tenaga kepelatihan yang profesional, proses identifikasi bakat dan pengembangan potensi atlet akan berjalan tidak optimal. Hal ini semakin diperburuk dengan ketiadaan pusat pelatihan maupun sekolah olahraga yang dapat menjadi wadah sistematis bagi pembinaan jangka panjang. Akibatnya, potensi besar generasi muda di Tangerang Selatan sering kali tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga kesempatan untuk melahirkan atlet berprestasi internasional menjadi terhambat.

Keterbatasan masterplan pengembangan olahraga juga memperlihatkan lemahnya arah kebijakan dan perencanaan strategis pemerintah daerah dalam sektor ini. Tanpa dokumen perencanaan yang komprehensif, pembangunan sarana dan prasarana olahraga kerap berjalan sporadis dan tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat maupun target pembinaan atlet. Selain itu, lemahnya ekosistem kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas olahraga, menyebabkan pengembangan olahraga tidak memperoleh dukungan yang memadai. Padahal, keberhasilan pembangunan olahraga modern membutuhkan sinergi multipihak agar tercipta sistem yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, penguatan sistem pembinaan olahraga di Kota Tangerang Selatan menuntut transformasi yang mencakup peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, penyusunan masterplan jangka panjang, serta pengembangan ekosistem kolaboratif. Hal ini tidak hanya akan mendorong peningkatan prestasi atlet secara konsisten, tetapi juga memperkuat peran olahraga sebagai instrumen pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, serta identitas kebanggaan daerah.

5 Keterbatasan sarana, prasarana, dan skema penghargaan olahraga yang berstandar dan berkelanjutan

Kota Tangerang Selatan menghadapi problem struktural yang signifikan dalam pembangunan keolahragaan, terutama terkait dengan keterbatasan ketersediaan fasilitas olahraga berstandar. Meskipun kota ini berkembang pesat sebagai pusat urban dengan kawasan premium seperti BSD, Alam Sutera, dan Bintaro yang relatif kaya akan infrastruktur modern, akses terhadap sarana olahraga yang memenuhi standar kompetisi nasional maupun internasional masih bersifat terbatas dan tidak merata. Banyak wilayah di luar kawasan

tersebut masih mengandalkan fasilitas komunitas berskala kecil yang hanya memadai untuk kegiatan rekreatif, namun kurang mendukung proses pembinaan atlet secara sistematis. Ketidakmerataan ini menciptakan kesenjangan kesempatan bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi keolahragaan mereka secara optimal.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan absennya skema penghargaan yang konsisten dan berkelanjutan bagi atlet berprestasi. Upaya pemerintah daerah melalui kegiatan apresiasi seperti Malam Apresiasi Insan Olahraga, pemberian hadiah berupa uang tunai atau beasiswa, serta dukungan pendidikan bagi atlet tertentu menunjukkan adanya perhatian, namun sifatnya masih insidental dan tidak mampu membangun sistem perlindungan jangka panjang. Pola penghargaan berbasis momentum semacam ini belum cukup menjawab kebutuhan fundamental atlet, khususnya terkait kepastian masa depan pasca-karier. Tanpa adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang terstruktur, banyak atlet berpotensi mengalami kesulitan ketika memasuki masa purna bakti, sehingga nilai motivasional penghargaan tersebut menjadi terbatas.

Kesenjangan dalam penyediaan fasilitas olahraga dan kebijakan penghargaan berdampak langsung terhadap tingkat motivasi generasi muda dalam menjadikan olahraga sebagai pilihan karier yang layak. Lingkungan latihan yang kurang representatif, ketidakjelasan jalur pembinaan, serta ketiadaan jaminan perlindungan pasca-pensiun menjadikan olahraga tampak sebagai jalur yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini berpotensi mengurangi minat pemuda untuk menekuni bidang olahraga secara serius, sekaligus memperlambat proses regenerasi atlet. Akibatnya, ruang untuk melahirkan atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional semakin menyempit, dan prestasi olahraga daerah pun cenderung stagnan.

Dalam menghadapi tantangan ini, arah kebijakan keolahragaan di Kota Tangerang Selatan perlu diarahkan pada dua dimensi utama: peningkatan kualitas serta pemerataan infrastruktur olahraga, dan pengembangan skema penghargaan yang berkelanjutan bagi atlet. Di tingkat infrastruktur, dibutuhkan penguatan kapasitas fasilitas olahraga dengan standar minimal skala provinsi yang dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Sementara itu, di sisi kebijakan penghargaan, pemerintah bersama KONI serta pemangku

kepentingan lainnya perlu menyusun mekanisme perlindungan yang menyeluruh, mencakup tunjangan prestasi, beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, serta program pelatihan keterampilan sebagai bekal transisi pasca-karier atlet.

Apabila kedua aspek ini diperkuat secara simultan, maka Kota Tangerang Selatan berpotensi membangun sistem pembinaan olahraga yang tidak sekadar berorientasi pada capaian prestasi jangka pendek, tetapi juga menekankan pada pembangunan manusia secara holistik. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan generasi muda yang tidak hanya memiliki akses sarana dan prasarana memadai, tetapi juga merasa terlindungi dan dihargai, sehingga terdorong untuk meniti jalur keolahragaan dari akar pembinaan hingga puncak prestasi dengan lebih berkelanjutan.

6 Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan kepramukaan secara berkelanjutan

Keterbatasan sarana, prasarana, serta skema penghargaan dalam bidang olahraga di Kota Tangerang Selatan mencerminkan permasalahan multidimensional yang erat kaitannya dengan pembangunan pemuda dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas olahraga yang masih terbatas dan belum merata di seluruh kecamatan berimplikasi langsung pada kesenjangan akses masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi prestasi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana yang memenuhi standar kompetisi regional maupun nasional, sehingga proses pembinaan atlet tidak dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Selain persoalan infrastruktur, sistem penghargaan dan perlindungan bagi atlet berprestasi juga belum berkembang dengan baik. Minimnya mekanisme insentif, jaminan karier, maupun dukungan kesejahteraan pasca-pensiun membuat atlet kurang memperoleh kepastian atas masa depan mereka. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya motivasi generasi muda untuk menekuni olahraga secara profesional. Dalam konteks pembangunan daerah, keterbatasan tersebut tidak hanya menghambat lahirnya atlet potensial dari Tangerang Selatan, tetapi juga menurunkan peran olahraga sebagai instrumen pembangunan sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Lebih jauh, rendahnya investasi pada sarana dan penghargaan olahraga memperkuat tantangan dalam mewujudkan ekosistem olahraga yang

berkelanjutan. Kota Tangerang Selatan, dengan dinamika kependudukan yang padat dan dominasi kelompok usia muda, seharusnya memiliki kebutuhan besar terhadap ruang dan fasilitas olahraga publik. Namun, kenyataannya ketersediaan lapangan, stadion mini, maupun fasilitas rekreasi berbasis olahraga masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan populasi. Hal ini menimbulkan disparitas akses antara wilayah yang memiliki fasilitas representatif dengan wilayah yang sama sekali tidak terlayani.

Dengan demikian, permasalahan keterbatasan sarana, prasarana, serta skema penghargaan olahraga di Kota Tangerang Selatan tidak dapat dipandang sekadar isu teknis, melainkan juga struktural dan kelembagaan. Penyelesaiannya membutuhkan intervensi kebijakan yang terintegrasi, mencakup pembangunan fasilitas berstandar, penguatan pembinaan atlet usia dini, serta penyusunan mekanisme penghargaan dan perlindungan sosial-ekonomi bagi atlet. Tanpa langkah strategis tersebut, potensi generasi muda dalam bidang olahraga berisiko terhambat, yang pada gilirannya dapat melemahkan kontribusi sektor olahraga dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 2. 12. Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
Dominasi penduduk usia produktif (bonus demografi)	Rendahnya daya saing dan kemandirian pemuda	SDGs: kualitas pendidikan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan	Agenda SDGs 2030 menekankan pemanfaatan bonus demografi untuk pertumbuhan berkelanjutan	Isu kesenjangan kualitas SDM muda antarnegara berkembang vs maju (UNDP Human Development Report)		Optimalisasi momentum bonus demografi
Tren peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Ketimpangan capaian antar-domain pembangunan pemuda (pendidikan, kesehatan,	SDGs: pendidikan berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender				Ketimpangan domain pembangunan pemuda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
	kesempatan kerja)					
Tingginya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Rendahnya kemandirian ekonomi pemuda (partisipasi ekonomi mandiri masih rendah ±1,78%)	SDGs: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur	Tren global kewirausahaan muda sebagai solusi pengangguran (ILO, World Bank)			Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda
Potensi pemuda dan masyarakat dalam bidang olahraga	Belum optimalnya sistem pembinaan olahraga berkelanjutan	SDGs: kesehatan dan kesejahteraan, kehidupan sehat				Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan
Perkembangan kawasan perkotaan	Keterbatasan sarana, prasarana, dan	SDGs: kota dan komunitas berkelanjutan				Keterbatasan sarana, prasarana, dan skema penghargaan olahraga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global	Nasional	Regional	
			(4)	(5)	(6)	
modern (BSD, Alam Sutera, Bintaro)	skema penghargaan olahraga yang berstandar					berstandar dan berkelanjutan
Basis kepramukaan di sekolah dan masyarakat	Belum optimalnya pembinaan dan sistem pengembangan kepramukaan berkelanjutan	SDGs: pendidikan berkualitas, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh	Global Citizenship Education (UNESCO) menekankan pendidikan karakter dan kepemimpinan			Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan kepramukaan berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, penetapan tujuan dan sasaran yang berlandaskan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dan evaluasi kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki dasar yang jelas serta target capaian yang terukur dari tahun ke tahun. Dengan demikian, indikator-indikator yang ditetapkan menjadi tolok ukur keberhasilan sekaligus pendorong konsistensi pembangunan daerah.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Peran pemuda diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang merefleksikan partisipasi mereka dalam wirausaha, organisasi kepemudaan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, capaian prestasi olahraga diukur melalui Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yang memperlihatkan tingkat keberhasilan atlet muda serta jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pembangunan kepemudaan dan olahraga ini menegaskan orientasi pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, pembangunan kepemudaan juga diarahkan pada penguatan karakter melalui kepramukaan. Indikator prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membentuk generasi muda yang berdisiplin, berintegritas, serta memiliki jiwa kebersamaan dan nasionalisme. Dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, olahraga, dan karakter, strategi pembangunan kepemudaan ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai kebangsaan.

Untuk mendukung keseluruhan agenda tersebut, perbaikan tata kelola perangkat daerah menjadi landasan penting. Melalui peningkatan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP), kepuasan pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, serta pemanfaatan inovasi daerah,

diharapkan kualitas birokrasi semakin responsif, akuntabel, dan adaptif. Tata kelola yang baik akan memperkuat efektivitas program pembangunan, sekaligus memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran RPJMD dapat tercapai secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	55,86	56,00	56,30	56,50	56,80	57,00	
			Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	N/A	0.092	0.093	0.094	0.095	0.096	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangu nan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,80%	1,83%	1,86%	1,90%	2%	2,30%	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	5,00%	5,05%	5,08%	5,10%	5,15%	5,20%	
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan di Tingkat Nasional	Jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	80	85	90	95	100	105	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dan Internasional	Jumlah Cabor dengan atlet berprestasi nasional dan internasional	18	19	20	21	22	23	
		Meningkatnya Prestasi kepramukaan	Prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional	N/A	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.00	87.10	87.50	87.70	88.00	88.2	
			Nilai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	77.80	78.00	78.20	78.40	78.60	78.80	
			Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan	1	1	1	1	1	1	

III.2 Strategi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Strategi pembangunan kepemudaan dan olahraga Kota Tangerang Selatan pada periode 2025–2030 diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, memperkuat kepramukaan, serta mendorong tata kelola perangkat daerah yang adaptif dan inovatif. Fokus utama strategi ini mencakup penguatan kompetensi pemuda melalui pendidikan, pelatihan, serta program kewirausahaan berbasis kreativitas; pengembangan Youth Creative Hub dan Sport Tech Hub yang terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas; serta penyediaan inkubator bisnis untuk mendorong kemandirian ekonomi pemuda. Di bidang olahraga, strategi menekankan peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, pembinaan atlet melalui sport academy, penerapan liga olahraga berbasis komunitas, serta pemberian insentif dan jaminan karier bagi atlet berprestasi. Pada bidang kepramukaan, pendekatan eco-pramuka dan smart scouting diprioritaskan untuk menjawab isu lingkungan perkotaan dan teknologi, termasuk fasilitasi program pertukaran nasional maupun internasional. Sementara itu, peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah diarahkan pada optimalisasi pelayanan publik digital, inovasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk memastikan pemuda, olahraga, dan kepramukaan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 2. Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Penguatan kapasitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan program kepemudaan berbasis kompetensi	V	V	V	V	V	V
		Pengembangan Youth Creative Hub dan Sport Tech Hub berbasis kolaborasi pemerintah, sekolah, kampus, dan komunitas		V	V	V	V	V
		Integrasi program kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan lintas sektor	V	V	V	V	V	V
		Penyediaan inkubator bisnis dan creative entrepreneurship hub		V	V	V	V	V
		Penguatan jejaring kepemudaan berbasis	V	V	V	V	V	V

Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		smart community untuk mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan						
		Mendorong BUMN, BUMD, dan swasta untuk alokasi CSR bagi kewirausahaan pemuda		V	V	V	V	V
		Penguatan kolaborasi dan jaringan komunitas kepemudaan		V	V	V	V	V
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Penguatan kapasitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan program kepemudaan berbasis kompetensi	V	V	V	V	V	V
		Penguatan jejaring kepemudaan berbasis smart community untuk mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan	V	V	V	V	V	V

Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Penguatan kolaborasi dan jaringan komunitas kepemudaan	V	V	V	V	V	V
	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan di Tingkat Nasional dan Internasional	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta ruang kreativitas pemuda		V	V	V	V	V
		Penyediaan Sarana Olahraga di Kota Tangerang Selatan sesuai standar nasional untuk kebutuhan ruang olahraga masyarakat dan olahraga prestasi		V	V			
		Pembinaan atlet berbasis sport academy		V	V	V	V	V
		Penerapan liga olahraga daerah (Tangsel League) berbasis komunitas dan sekolah untuk pembinaan berjenjang		V	V	V	V	V
		Pemberian beasiswa sport-tech dan branding atlet		V	V	V	V	V

Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		muda sebagai duta kota kreatif dan olahraga						
		Pemberian insentif dan jaminan karier bagi atlet berprestasi		V	V	V	V	V
		Sertifikasi dan peningkatan kompetensi pelatih secara berkelanjutan	V	V	V	V	V	V
		Kolaborasi lintas stakeholder dalam pembangunan olahraga daerah	V	V	V	V	V	V
	Meningkatnya Prestasi Kepramukaan	Pembinaan pramuka berbasis eco-pramuka dan smart scouting untuk isu lingkungan perkotaan dan teknologi		V	V	V	V	V
		Fasilitasi exchange program pramuka dengan daerah lain dan forum internasional		V	V	V	V	V

Tujuan	Sasaran	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Integrasi pramuka dengan kurikulum pendidikan karakter						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Optimalisasi pelayanan publik digital, serta peningkatan pengelolaan keuangan, aset, dan inovasi daerah	V	V	V	V	V	V
		Penguatan inovasi dan kerjasama	V	V	V	V	V	V

III.3 Arah Kebijakan Renstra PD

Peningkatan kapasitas pemuda dan pengembangan olahraga di Kota Tangerang Selatan merupakan kebutuhan strategis yang mendesak, seiring dengan besarnya potensi bonus demografi dan peran generasi muda sebagai motor inovasi, kreativitas, serta pembangunan sosial-ekonomi daerah. Generasi muda tidak hanya menjadi penerus pembangunan, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif, olahraga, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, strategi pembangunan pemuda dan olahraga harus dirumuskan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis bukti, dengan memperhatikan keterkaitan lintas sektor.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun bertujuan memperkuat kompetensi, partisipasi, dan prestasi pemuda, sekaligus membangun ekosistem yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan olahraga. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan komunitas pemuda, sehingga setiap intervensi mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan kapasitas individu maupun kelompok.

Fokus utama strategi mencakup beberapa aspek. Pertama, penguatan kapasitas dan ekosistem pemuda serta olahraga melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan Youth Creative Hub dan Sport Tech Hub, serta integrasi program kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan lintas sektor. Kedua, fasilitasi pengembangan wirausaha muda berbasis inovasi dan digitalisasi melalui inkubator bisnis dan creative entrepreneurship hub. Ketiga, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan jejaring sosial pemuda, termasuk kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk memperluas peluang partisipasi dan pemberdayaan.

Selanjutnya, optimalisasi pembinaan atlet muda sejak usia dini dilakukan melalui sport academy, liga olahraga daerah, pemberian beasiswa sport-tech, insentif dan jaminan karier bagi atlet berprestasi, serta sertifikasi dan peningkatan kompetensi pelatih. Kolaborasi lintas stakeholder juga menjadi elemen penting dalam memastikan pembinaan olahraga berjalan berkelanjutan. Selain itu, revitalisasi kepramukaan difokuskan sebagai wadah pembentukan karakter dan prestasi melalui pendekatan eco-pramuka, smart scouting, program pertukaran, dan integrasi kurikulum pendidikan karakter.

Terakhir, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah berbasis outcome menjadi landasan dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Optimalisasi pelayanan publik digital, pengelolaan keuangan dan aset, serta inovasi dan kerja sama lintas sektor menjadi instrumen penting untuk mendukung implementasi strategi. Keseluruhan strategi ini dirancang untuk periode 2025–2029, menekankan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan komunitas sebagai fondasi bagi pembangunan pemuda dan olahraga yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan daerah dapat terukur dan berdampak nyata.

Tabel 3. 3. Arah Kebijakan

NSPK sesuai Perangkat Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan.	Penguatan kapasitas dan ekosistem pemuda serta olahraga secara terintegrasi lintas sektor.
	Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses dan kompetensi terhadap sektor ekonomi dan sektor strategis pembangunan lainnya.	Fasilitasi pengembangan wirausaha muda berbasis inovasi dan digitalisasi Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi pemuda dalam organisasi sosial Revitalisasi kepramukaan sebagai wadah pembentukan karakter dan prestasi melalui penguatan jejaring nasional dan internasional

NSPK sesuai Perangkat Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, kolaboratif dan berintegritas.	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah berbasis outcome

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Sebagai kelanjutan dari rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga, sub-bab 4.1 menitikberatkan pada identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi implementasi nyata dari strategi tersebut. Langkah ini sangat penting mengingat urgensi peningkatan kapasitas, partisipasi, dan prestasi generasi muda sebagai penggerak inovasi, kreativitas, dan pembangunan sosial-ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan ini tidak hanya menjembatani perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional, tetapi juga memastikan setiap intervensi dapat terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap pengembangan ekosistem kepemudaan dan olahraga yang berkelanjutan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang disusun berdasarkan prioritas pembangunan lintas sektor. Fokusnya mencakup penguatan kompetensi pemuda melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekosistem wirausaha dan inovasi, pembinaan atlet muda dari usia dini hingga jenjang kompetisi, revitalisasi kepramukaan sebagai wahana pembentukan karakter dan prestasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Setiap komponen diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, sehingga integrasi antara perencanaan strategis dan implementasi kegiatan mampu memaksimalkan efektivitas dan dampak pembangunan.

Dengan kerangka waktu 2025–2029, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan juga mempertimbangkan sinergi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta inovasi dalam metode pelaksanaan. Tabel berikut menyajikan rincian program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan tidak hanya menjadi instrumen implementasi, tetapi juga mekanisme untuk mengukur capaian strategis dan dampak nyata bagi pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 1. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
	Pemuda				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		
	Dalam						
	Pembangunan dan	Meningkatnya			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda		
	Prestasi Olahraga	Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)		
			Meningkatnya daya saing		Rasio wirausaha pemuda	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			kepemuda an			KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Menguatnya akses pemuda terhadap peluang kerja dan wirausaha	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				meningkatny a tatakelola kepemudaan yang profesional dan kolaboratif	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Meningkatny a Apresiasi dan Penghargaan Terhadap Pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Meningkatny a kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Meningkatny a Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyaraka tan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan di Tingkat Nasional dan			Jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional		
					Jumlah Cabor dengan atlet berprestasi nasional dan internasional		
			Meningkatnya		Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas	2.19.03 - PROGRAM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
		Internasion al	pembuday aan dan prestasi olah raga			PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase atlet yang masuk Pelatnas	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Meningkatny a pembinaan olahraga yang Berkualitas dan Inklusif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggarakan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tingkat Daerah Kab/Kota		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Atlet dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				meningkatny a tatakelola keolahragaan yang profesional dan kolaboratif	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Meningkatny a Olahraga Rekreasi dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Prasarana dan Sarana Keolahragaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Meningkat nya Prestasi kepramuka an		Prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional		
			Meningkat nya kualitas kepramuk aan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				meningkatny a tatakelola kepramukaa	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				n yang profesional dan kolaboratif	Tersedia dan Termanfaatkan	Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah SDM	2.19.04.2.01 -	
					Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2.19.04.2.01 -	
					Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan	2.19.04.2.01 -	
					Tingkat Daerah yang	Pembinaan dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Terkelola dan Termanfaatkan	Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
		Meningkatnya			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat		
					Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan		
Predikat SAKIP OPD					Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		
					Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya perencanaan OPD	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil	2.19.01.2.01 -	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	2.19.01.2.01 -	
					Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	2.19.01.2.01 -	
					Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	2.19.01.2.01 -	
					Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
					Dokumen RKA-SKPD	Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhiny a pelayanan umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
				Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	2.19.01.2.05 -	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan	2.19.01.2.09 -	
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.19.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen	2.19.01.2.02.0004 -	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan	2.19.01.2.02.0005 -	
					Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan	2.19.01.2.02.0006 -	
					Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.19.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Peningkatan kapasitas pemuda dan pengembangan olahraga di Kota Tangerang Selatan menjadi kebutuhan strategis yang mendesak, seiring dengan besarnya potensi bonus demografi dan peran generasi muda sebagai motor inovasi, kreativitas, serta pembangunan sosial-ekonomi daerah. Sub-bab 4.2 memfokuskan pada rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaannya sebagai langkah konkret untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Pendanaan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan menjadi faktor kritis agar setiap intervensi dapat diimplementasikan secara efektif, berdampak nyata, dan mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Rencana pendanaan disusun berdasarkan keterkaitan logis antara target outcome/output dan alokasi anggaran, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan lintas sektor. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), peningkatan jumlah wirausaha muda, pembinaan atlet berprestasi, penguatan pramuka, serta pengembangan kapasitas perangkat daerah. Struktur pendanaan juga dirancang progresif, dengan pagu indikatif yang menyesuaikan kebutuhan program prioritas, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan seperti pemeliharaan sarana olahraga dan dukungan kegiatan kepramukaan.

Selain itu, mekanisme pendanaan mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi melalui perencanaan multi-tahun, penetapan baseline, target tahunan, serta indikator verifikasi yang jelas. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diikat dengan pencapaian kinerja kuartalan, sehingga penggunaan anggaran dapat dimonitor dan dievaluasi secara sistematis. Dengan pendekatan ini, pendanaan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan, tetapi juga sarana strategis untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kapasitas, partisipasi, dan prestasi generasi muda di Kota Tangerang Selatan pada periode 2026–2030.

Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				6.006.628.000,00		6.186.826.840,00		6.372.431.646,00		6.563.604.595,00		6.760.512.733,00
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	N/A%	0,5%	-	1%		1,5%		2%		2,5%	
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	5	5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				4.714.628.000,00		4.856.066.840,00		5.001.748.846,00		5.151.801.311,00		5.306.355.351,00
Menguatnya akses pemuda terhadap peluang kerja dan wirausaha	Persentase wirausaha pemuda yang didampingi	0	10%		12%		15%		17%		20%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
meningkatnya tatakelola kepemudaan yang profesional dan kolaboratif	persentase kerjasama kepemudaan yang ditindaklanjuti	0	0%		0%		50%		50%		50%	
	Presentase regulasi dan perencanaan Kepemudaan yang disusun dan ditetapkan	0	0%		0%		50%		50%		50%	
Meningkatnya Apresiasi dan Penghargaan Terhadap Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mendapat Penghargaan	4	10		12		15		17		20	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan	0	100		100		100		100		100	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				326.050.000,00		335.831.500,00		345.906.446,00		356.283.639,00		366.972.151,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700	700	326.050.000,00	720	335.831.500,00	740	345.906.446,00	750	356.283.639,00	775	366.972.151,00
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,00
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	53.045.000,00	10	54.636.350,00	10	56.275.440,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,00
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00	1	56.275.440,00
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				150.000.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		163.909.050,00		168.826.321,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
meningkatnya tatakelola kepemudaan yang profesional dan kolaboratif	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	150.000.000,00	1	154.500.000,00	1	159.135.000,00	1	163.909.050,00	1	168.826.321,00
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				3.588.578.000,00		3.696.235.340,00		3.807.122.400,00		3.921.336.072,00		4.038.976.154,00
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	1	3.588.578.000,00	1	3.696.235.340,00	1	3.807.122.400,00	1	3.921.336.072,00	1	4.038.976.154,00
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	0	50	50.000.000,00	50	51.500.000,00	50	53.045.000,00	50	54.636.350,00	50	56.275.440,00
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				500.000.000,00		515.000.000,00		530.450.000,00		546.363.500,00		562.754.405,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100	100	500.000.000,00	100	515.000.000,00	100	530.450.000,00	100	546.363.500,00	100	562.754.405,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.292.000.000,00		1.330.760.000,00		1.370.682.800,00		1.411.803.284,00		1.454.157.382,00
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	17.402	17.450		17.500		17.550		17.600		17.650	
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1.092.000.000,00		1.124.760.000,00		1.158.502.800,00		1.193.257.884,00		1.229.055.620,00
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	65	1.092.000.000,00	70	1.124.760.000,00	75	1.158.502.800,00	80	1.193.257.884,00	85	1.229.055.620,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0	25	200.000.000,00	30	206.000.000,00	35	212.180.000,00	40	218.545.400,00	45	225.101.762,00
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				104.620.744.611,00		17.617.478.386,00		17.516.351.257,00		18.580.595.653,00		18.904.322.043,00
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas	0	1,70%		1,70%		1,70%		1,70%		1,70%	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	6,60%	6,60%		6,60%		6,60%		6,60%		6,60%	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.310.135.921,00		2.286.135.921,00		1.968.597.679,00		3.021.735.980,00		2.476.388.060,00
Meningkatnya pembinaan olahraga yang Berkualitas dan Inklusif	Jumlah Event Kejuaraan Usia Dini	1	1		1		1		1		1	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				1.000.000.000,00		1.286.135.921,00		1.168.597.679,00		1.521.735.980,00		1.676.388.060,00
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	13	7	1.000.000.000,00	7	1.286.135.921,00	7	1.168.597.679,00	7	1.521.735.980,00	7	1.676.388.060,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				3.310.135.921,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		1.500.000.000,00		800.000.000,00
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5	5	3.310.135.921,00	5	1.000.000.000,00	5	800.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	800.000.000,00
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.800.000.000,00		1.024.000.000,00		800.000.000,00		1.200.000.000,00		1.000.000.000,00
Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga	3	6		8		6		8		6	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Daerah Kab/Kota											
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				800.000.000,00		824.000.000,00		600.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	800.000.000,00	6	824.000.000,00	3	600.000.000,00	6	1.000.000.000,00	3	800.000.000,00
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				4.000.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100	400	4.000.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				6.744.310.366,00		2.521.922.690,00		3.821.922.690,00		2.700.000.000,00		4.250.000.000,00
Meningkatnya kualitas Atlet dan Tenaga Keolahragaan	Persentase Atlet dan Tenaga Olahraga yang Dibina	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Cabor yang Dibina	100	100		100		100		100		100	
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				4.422.387.676,00		200.000.000,00		1.500.000.000,00		200.000.000,00		1.750.000.000,00
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0	400	4.422.387.676,00	100	200.000.000,00	300	1.500.000.000,00	100	200.000.000,00	350	1.750.000.000,00
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				2.321.922.690,00		2.321.922.690,00		2.321.922.690,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	196	300	2.321.922.690,00	100	2.321.922.690,00	250	2.321.922.690,00	100	2.500.000.000,00	350	2.500.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
berjasa dalam memajukan Olahraga												
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				85.438.686.000,00		8.435.419.775,00		7.575.830.888,00		7.858.859.673,00		7.377.933.983,00
meningkatnya tatakelola keolahragaan yang profesional dan kolaboratif	persentase kerjasama keolahrgaan yang ditindaklanjuti	20%	20%		20%		20%		20%		20%	
	Jumlah regulasi dan perencanaan Keolahragaan yang disusun dan ditetapkan	0	1		1		1		1		1	
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				85.438.686.000,00		8.435.419.775,00		7.575.830.888,00		7.858.859.673,00		7.377.933.983,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0	1	85.438.686.000,00	1	8.435.419.775,00	1	7.575.830.888,00	1	7.858.859.673,00	1	7.377.933.983,00
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				3.327.612.324,00		3.350.000.000,00		3.350.000.000,00		3.800.000.000,00		3.800.000.000,00
Meningkatnya Olahraga Rekreasi dan Masyarakat	Persentase masyarakat yang rutin melakukan aktivitas olahraga	0	0,76	3.327.612.324,00	0,77	3.350.000.000,00	0,78	3.350.000.000,00	0,79	3.800.000.000,00	0,8	3.800.000.000,00
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00
2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata,				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tantangan dan Petualangan												
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,				1.177.612.324,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
pengembangan, dan pengawasan												
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Keolahragaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13	13	1.177.612.324,00	13	1.200.000.000,00	13	1.200.000.000,00	13	1.500.000.000,00	13	1.500.000.000,00
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	2	1.350.000.000,00	2	1.350.000.000,00	2	1.350.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.642.262.149,00		1.703.530.013,00		1.766.635.914,00		1.831.634.991,00		1.898.584.041,00
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0	00.03	1.642.262.149,00	00.05	1.703.530.013,00	00.07	1.766.635.914,00	00.09	1.831.634.991,00	01.01	1.898.584.041,00
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.642.262.149,00		1.703.530.013,00		1.766.635.914,00		1.831.634.991,00		1.898.584.041,00
meningkatkan tatakelola kepramukaan yang profesional dan kolaboratif	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17	17	1.642.262.149,00	17	1.703.530.013,00	17	1.766.635.914,00	17	1.831.634.991,00	17	1.036.019.057,00
2.19.04.2.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan				300.000.000,00		309.000.000,00		318.270.000,00		327.818.100,00		337.652.643,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
di Daerah Kabupaten/Kota												
Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	0	1	300.000.000,00	1	309.000.000,00	1	318.270.000,00	1	327.818.100,00	1	337.652.643,00
2.19.04.2.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				216.377.816,00		222.869.150,00		229.555.224,00		236.441.881,00		243.535.138,00
Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	0	1	216.377.816,00	1	222.869.150,00	1	229.555.224,00	1	236.441.881,00	1	243.535.138,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Kepramukaan Tingkat Daerah												
2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.441,00
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00	1	56.275.441,00
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				200.000.000,00		206.000.000,00		212.180.000,00		218.545.400,00		225.101.762,00
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	200	200.000.000,00	200	206.000.000,00	200	212.180.000,00	200	218.545.400,00	200	225.101.762,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				875.884.333,00		914.160.863,00		953.585.690,00		994.193.260,00		1.036.019.057,00
Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17	17	875.884.333,00	17	914.160.863,00	17	953.585.690,00	17	994.193.260,00	17	1.036.019.057,00
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.618.493.480,00		24.949.889.941,0 0		25.402.306.363,0 0		25.081.889.941,0 0		25.494.306.363,0 0
Meningkatnya Kualitas perencanaan OPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan PD		100		100		100		100		100	
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional PD		100		100		100		100		100	
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah		100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				415.000.000,00		415.000.000,00		427.450.000,00		415.000.000,00		427.450.000,00
tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30	415.000.000,00	30	415.000.000,00	30	427.450.000,00	30	415.000.000,00	30	427.450.000,00
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	103.000.000,00	12	100.000.000,00	12	103.000.000,00
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.900.000,00		30.000.000,00		30.900.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.900.000,00	2	30.000.000,00	2	30.900.000,00
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		46.350.000,00		45.000.000,00		46.350.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	45.000.000,00	7	45.000.000,00	7	46.350.000,00	7	45.000.000,00	7	46.350.000,00
2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00
2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		154.500.000,00		150.000.000,00		154.500.000,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	154.500.000,00	1	150.000.000,00	1	154.500.000,00
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.965.000.000,00		18.469.682.385,0 0		18.472.832.385,0 0		18.469.682.385,0 0		18.472.832.385,0 0
Tersusnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100	100	14.965.000.000,00	100	18.469.682.385,0 0	100	18.472.832.385,0 0	100	18.469.682.385,0 0	100	18.472.832.385,0 0
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.860.000.000,00		18.364.682.385,0 0		18.364.682.385,0 0		18.364.682.385,0 0		18.364.682.385,0 0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	177	14.860.000.000,00	177	18.364.682.385	177	18.364.682.385	177	18.364.682.385	177	18.364.682.385
2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.450.000,00	2	15.000.000,00	2	15.450.000,00
2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00
2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00
2.19.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.450.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00
2.19.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.450.000,00	2	15.000.000,00	2	15.450.000,00
2.19.01.2.03 - Administrasi Barang				80.000.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	82.400.000,00	100	80.000.000,00	100	82.400.000,00
2.19.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00
2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	51.500.000,00	12	50.000.000,00	12	51.500.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD											
2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00	4	15.000.000,00	4	15.450.000,00
2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00
Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	82.400.000,00	100	80.000.000,00	100	82.400.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00
2.19.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	51.500.000,00	4	50.000.000,00	4	51.500.000,00
2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00		15.000.000,00		15.450.000,00
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00	12	15.000.000,00	12	15.450.000,00
2.19.01.2.05 - Administrasi				495.000.000,00		235.000.000,00		574.670.000,00		235.000.000,00		574.670.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Kepegawaian Perangkat Daerah												
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	495.000.000,00	100	235.000.000,00	100	574.670.000,00	100	235.000.000,00	100	574.670.000,00
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				260.000.000,00		0		332.620.000,00		0		332.620.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	177	260.000.000,00	0	0	177	332.620.000,00	0	0	177	332.620.000,00
2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35.000.000,00		35.000.000,00		36.050.000,00		35.000.000,00		36.050.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.050.000,00	1	35.000.000,00	1	36.050.000,00
2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000,00		200.000.000,00		206.000.000,00		200.000.000,00		206.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	235	200.000.000,00	235	200.000.000,00	235	206.000.000,00	235	200.000.000,00	235	206.000.000,00
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.360.000.000,00		2.429.269.076,00		2.502.147.148,00		2.524.793.325,00		2.556.577.125,00
Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	2.360.000.000,00	100	2.429.269.076,00	100	2.502.147.148,00	100	2.524.793.325,00	100	2.556.577.125,00
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.457.068.858,00		1.500.000.000,00		1.545.000.000,00		1.500.000.000,00		1.545.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	1.457.068.858,00	6	1.500.000.000,00	6	1.545.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.545.000.000,00
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.348.076,00		82.758.518,00		85.241.274,00		87.798.512,00		90.432.467,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	80.348.076,00	1	82.758.518,00	1	85.241.274,00	1	87.798.512,00	1	90.432.467,00
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				154.959.396,00		159.608.178,00		164.396.423,00		169.328.316,00		174.408.165,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	154.959.396,00	3	159.608.178,00	3	164.396.423,00	3	169.328.316,00	3	174.408.165,00
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				59.617.032,00		61.405.543,00		63.247.709,00		65.145.141,00		67.099.495,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	59.617.032,00	7	61.405.543,00	7	63.247.709,00	7	65.145.141,00	7	67.099.495,00
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				31.250.000,00		32.187.500,00		33.153.125,00		34.147.719,00		35.172.150,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	31.250.000,00	12	32.187.500,00	12	33.153.125,00	12	34.147.719,00	12	35.172.150,00
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				551.756.638,00		568.309.337,00		585.358.617,00		643.373.637,00		618.714.848,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	551.756.638,00	12	568.309.337,00	12	585.358.617,00	12	643.373.637,00	12	618.714.848,00
2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.750.000,00		25.000.000,00		25.750.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.750.000,00	1	25.000.000,00	1	25.750.000,00
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00
2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00
Terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00		2.291.993.480,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00	12	2.291.993.480,00
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				631.500.000,00		648.945.000,00		668.413.350,00		685.420.751,00		705.983.373,00
Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	631.500.000,00	100	648.945.000,00	100	668.413.350,00	100	685.420.751,00	100	705.983.373,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				288.993.600,00		297.663.408,00		306.593.310,00		315.791.110,00		325.264.843,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	288.993.600,00	8	297.663.408,00	8	306.593.310,00	8	315.791.110,00	8	325.264.843,00
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				189.472.000,00		195.156.160,00		201.010.845,00		207.041.170,00		213.252.405,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	189.472.000,00	20	195.156.160,00	20	201.010.845,00	20	207.041.170,00	20	213.252.405,00
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.842.590,00		26.617.868,00		27.416.404,00		28.238.896,00		29.086.063,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	25.842.590,00	20	26.617.868,00	20	27.416.404,00	20	28.238.896,00	20	29.086.063,00
2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	51.500.000,00	5	50.000.000,00	5	51.500.000,00
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.191.810,00		79.507.564,00		81.892.791,00		84.349.575,00		86.880.062,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	77.191.810,00	1	79.507.564,00	1	81.892.791,00	1	84.349.575,00	1	86.880.062,00
TOTAL PAGU				133.888.128.240,00		50.457.725.180,00		51.057.725.180,00		52.057.725.180,00		53.057.725.180,00
PAGU INDIKATIF DARI BAPPEDA				133.888.128.240,00		50.457.725.180,00		51.057.725.180,00		52.057.725.180,00		53.057.725.180,00

IV.2 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dan Program Unggulan Kdh/Wkdh

Daftar subkegiatan prioritas yang disusun dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga menggambarkan arah intervensi nyata untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Pada bidang kepemudaan, fokus diarahkan pada peningkatan daya saing melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pelopor, wirausaha muda, serta kader kepemudaan di tingkat kabupaten/kota, disertai dengan penguatan organisasi kepemudaan. Pada bidang olahraga, strategi diarahkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga melalui pembinaan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan daerah, pengembangan olahraga prestasi, serta pembinaan olahraga rekreasi dan organisasi olahraga. Sementara itu, bidang kepramukaan menekankan pembinaan dan penguatan organisasi pramuka untuk membangun karakter generasi muda. Sebagai penunjang utama, program perangkat daerah diarahkan pada penguatan tata kelola dengan subkegiatan yang sangat beragam, mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi keuangan dan aset, hingga penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja perangkat daerah. Keseluruhan subkegiatan ini dirancang untuk memastikan sinergi antara penguatan kapasitas pemuda, olahraga, kepramukaan, serta tata kelola kelembagaan dalam mendorong pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan		
			2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
2	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

No	Program Prioritas	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

Tabel 4. 4. Rencana Tindak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Fokus Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Fokus Pembangunan	Konsep/Penjelasan	Rencana Tindak	Satuan	Target						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Griya Sehat (termasuk untuk Lansia dan Disabilitas) melalui pembangunan / kerjasama dengan panti	Menyediakan dan memberikan ruang aktivitas bersama bagi Lansia dengan istilah Griya Lansia untuk melakukan sosialisasi dan interaksi yang dilengkapi dengan layanan kesehatan (modern/ tradisioal), layanan sosial (konseling/ psikoterapi), layanan keagamaan, layanan pengembangan hobi dan layanan	Memberikan layanan kebugaran jasmani	kali	7	7	7	7	7	7	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Fokus Pembangunan	Konsep/Penjelasan	Rencana Tindak	Satuan	Target						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	kebugaran jasmani serta dapat diakses juga oleh Penyandang Disabilitas											
Pembangunan sarana olahraga standar nasional	Penyediaan Sarana Olahraga di Kota Tangerang Selatan sesuai standar nasional untuk kebutuhan ruang olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.	1. Mengkaji lokus dan prioritas	Dok			1				Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kot a
		2. Menetapkan lokus melalui Keputusan Kepala Daerah	Dok			1						
		3. Menyusun dan menetapkan pola pengelolaan dan pemanfaatan	Dok					1				
Penyelenggaraan Event Skala	Penyelenggaraan event sebagai	Tangsel Marathon	Keg.	1	1	1	1	1	1	Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Pengembangan	Pemassalan olahraga dan

Fokus Pembangunan	Konsep/Penjelasan	Rencana Tindak	Satuan	Target						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Nasional Dan Internasional	Daya Tarik Wisata Wisatawan									Daya Saing Keolahragaan daerah, nasional, dan internasional	Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat
Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kerja Melalui Program 3d Sebanyak 2500 Orang Termasuk 200 Orang Penyandang Disabilitas.	Program 3D (dilatih, disertifikasi, ditempatkan) adalah program paket yang diberikan kepada Angkatan Kerja ber KTP Tangerang Selatan dalam upaya menurunkan angka pengangguran.	Integrasi modul pelatihan bersertifikasi BNSP kepada SKPD	dok		1					Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

IV.3 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang selaras dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029, khususnya pada pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) bidang olahraga. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan strategis. Fokus utama diarahkan pada pembinaan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan daerah, pengembangan olahraga prestasi, pembinaan organisasi olahraga, serta pengembangan olahraga rekreasi. Subkegiatan yang dirancang menunjukkan upaya menyeluruh, mulai dari penyediaan prasarana, pemberdayaan organisasi olahraga, seleksi dan penghargaan atlet berprestasi, hingga pemassalan olahraga rekreasi yang melibatkan masyarakat secara luas. Rangkaian program ini bukan hanya mendukung lahirnya atlet berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, tetapi juga memperkuat budaya olahraga masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 5. Daftar Program, kegiatan, sub kegiatan dalam mendukung kegiatan prioritas RPJMN tahun 2025-2029

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	Progran	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengembangan Manajcmen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	2.19.03 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025- 2029	Progran	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Daerah Kabupaten/Kota	dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
			2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
		2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
			2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025- 2029	Progran	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	kejuaraan olahraga
			2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
		2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
			2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025- 2029	Progran	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
			2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
			2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

IV.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

IV.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berperan sebagai alat ukur strategis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan. IKU dirancang secara selektif berdasarkan prioritas kebijakan daerah, dengan menekankan relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Fungsi utama IKU adalah sebagai pedoman evaluasi kinerja organisasi, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada periode 2025–2029. Dengan adanya IKU, setiap program dan kebijakan dapat dipastikan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan serta mendukung prioritas pembangunan nasional.

IKU yang disusun mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas pemuda, pertumbuhan wirausaha muda, partisipasi dalam organisasi kepemudaan, prestasi atlet dan kepramukaan, hingga akuntabilitas dan inovasi perangkat daerah. Setiap indikator memiliki target tahunan yang terukur, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian strategi secara berkesinambungan. Tabel berikut memaparkan rincian IKU beserta satuan dan target tahunan 2025–2029, yang menjadi acuan utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keberhasilan program pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 6. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KE T.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	%	55,8 6	56,0 0	56,3 0	56,5 0	56,8 0	57,0 0	
Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	%	N/A	0.09 2	0.09 3	0.09 4	0.09 5	0.09 6	
Tingkat partisipasi Pemuda	%	1,80 %	1,83 %	1,86 %	1,90 %	1,96 %	2,00 %	

INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KE T.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
dalam kegiatan ekonomi mandiri								
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	%	5,00 %	5,05 %	5,08 %	5,10 %	5,15 %	5,20 %	
Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Orang	80	85	90	95	100	105	
Jumlah Cabor dengan atlet berprestasi nasional dan internasional	Unit cabor	18	19	20	21	22	23	
Prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional	orang/unit	N/A	1	1	1	1	1	

IV.4.2 **Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai alat ukur terperinci untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tangerang Selatan sesuai target yang telah ditetapkan. IKK dirancang untuk mengukur capaian kinerja yang lebih spesifik dan teknis dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga memberikan gambaran nyata tentang efektivitas implementasi program, kegiatan, dan subkegiatan. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap intervensi mampu menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat, pemuda, dan atlet yang menjadi sasaran pembangunan.

Penyusunan IKK mengacu pada kebutuhan lokal dan prioritas strategis, sehingga setiap indikator yang ditetapkan mampu mencerminkan pencapaian hasil konkret dari program dan kebijakan. IKK tidak hanya menilai kuantitas, tetapi juga kualitas pelaksanaan, seperti pertumbuhan wirausaha pemuda, partisipasi atlet dalam Pelatnas, dan keterlibatan masyarakat dalam kepramukaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan relevan dengan visi dan misi pembangunan kepemudaan dan olahraga Kota Tangerang Selatan pada periode 2025–2029.

Selain itu, IKK menjadi sarana evaluasi yang strategis bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan program. Indikator ini memungkinkan monitoring yang konsisten, identifikasi permasalahan secara dini, dan penyesuaian kebijakan berbasis bukti. Tabel berikut menyajikan rincian IKK beserta target tahunan 2026–2030, yang menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 7. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(02)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio wirausaha pemuda	%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	
2	Jumlah Pemuda Pelopor	orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	

	Tingkat Provinsi							
3	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas	%	1,7%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	
4	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	6,6%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	
6	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan PD	%	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemenuhan Operasional PD	%	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari dokumen Rencana Strategis ini, disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah merumuskan arah pembangunan lima tahunan yang fokus pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dan kepramukaan. Indikator Indek Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indek Pembangunan Olahraga (IPO) menjadi indikator tujuan yang menjadi fokus dari Dinas Kepmudaan dan Olahraga dalam lima tahun ke depan. Rencana strategis ini dirancang secara sistematis untuk menjadi acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Tangerang Selatan.

v.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam periode 2025–2029 akan mengacu pada prinsip *good governance*, dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, serta orientasi pada hasil. Penjabaran kegiatan akan dilakukan secara sistematis, berbasis kebutuhan riil, serta memperhatikan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, pendekatan kolaboratif antar perangkat daerah dan kemitraan dengan stakeholder akan diperkuat guna mendukung pencapaian target kinerja yang optimal.

v.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis dilakukan secara berkala melalui mekanisme *monitoring* dan *evaluasi kinerja berbasis indikator*. Evaluasi akan diarahkan untuk tidak hanya mengukur capaian output, tetapi juga menganalisis efektivitas dampaknya terhadap pencapaian indikator pada setiap tingkatan. Setiap capaian akan didokumentasikan dalam laporan kinerja tahunan, dan hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan kebijakan serta perencanaan tahun berikutnya. Dengan sistem pengendalian yang adaptif dan responsif, diharapkan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

V.3 kerangka kelembagaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid, sinergis, dan terkoordinasi. Dispora Kota Tangerang berperan sebagai leading sector yang bertanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. Sebagai aktor utama, Dispora juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan, pelaksanaan Renstra ini melibatkan berbagai perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwisata berperan sebagai mitra pendukung melalui penyediaan sarana prasarana, layanan kesehatan olahraga, pembinaan generasi muda, serta integrasi dengan pengembangan sektor pariwisata daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan dalam mengintegrasikan arah kebijakan Dispora ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah secara lebih luas.

Selain itu, kerangka kelembagaan juga mencakup kemitraan dengan lembaga di luar pemerintah daerah. KONI, KORMI, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, perguruan tinggi, serta dunia usaha merupakan mitra strategis yang berkontribusi dalam pembinaan atlet, pengembangan event olahraga, pemberdayaan pemuda, serta penyediaan dukungan sumber daya. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperluas dampak program Dispora sehingga lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, hubungan vertikal juga dijalin dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga Kota Tangerang dengan kebijakan provinsi maupun nasional, serta mengakses program prioritas dan sumber pendanaan yang tersedia.

V.4 kerangka kelembagaan

Dalam mendukung keberhasilan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Tangerang, diperlukan landasan regulasi yang jelas, terintegrasi, dan sesuai dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum, pedoman pelaksanaan program, serta instrumen koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pada tingkat nasional, kerangka regulasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menjadi acuan utama dalam pengembangan olahraga prestasi, pendidikan, dan rekreasi. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjadi dasar hukum dalam membangun kapasitas, partisipasi, dan pemberdayaan pemuda. Sejumlah peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga juga memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang dan Peraturan Wali Kota Tangerang yang mengatur bidang pemuda dan olahraga menjadi instrumen penting untuk mengoperasionalisasikan mandat nasional ke dalam konteks lokal. Keberadaan Perda/Perwal terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), keolahragaan daerah, kepemudaan, serta tata kelola kerja sama lintas sektor perlu diperkuat agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, regulasi daerah mengenai kemitraan dengan dunia usaha, pengelolaan prasarana olahraga, dan tata kelola organisasi keolahragaan juga menjadi instrumen pendukung.

Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, diharapkan arah kebijakan Dispora Kota Tangerang memiliki dasar hukum yang kokoh, memudahkan koordinasi lintas sektor, serta menjamin keberlanjutan program di bidang kepemudaan dan olahraga.

Regulasi	Substansi Utama	Relevansi Strategis
Perda/Perwal Keolahragaan Daerah	Pembinaan, penghargaan, pengelolaan prasarana olahraga	Payung hukum olahraga daerah
Perda/Perwal tentang Insentif dan Karir Atlet Berprestasi	Bonus, beasiswa, jaminan sosial, peluang kerja	Menjamin masa depan atlet
Perda/Perwal Sport Industry dan Tourism	Pengembangan ekonomi olahraga, event, wisata	Mendorong kemandirian ekonomi atlet

Regulasi	Substansi Utama	Relevansi Strategis
Perda/Perwal Jaminan Sosial Atlet dan Pelatih	Perlindungan kesehatan, pensiun, asuransi	Menjamin kesejahteraan atlet dan pelatih
Perda/Perwal Database Atlet dan Organisasi Olahraga	Sistem pendataan berbasis digital	Basis kebijakan insentif dan pembinaan
MoU Lintas OPD (Dispora, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perindag, Pariwisata)	Pendidikan, kerja, wirausaha olahraga	Mendukung keberlanjutan karir atlet

Demikian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 - 2029 disusun agar dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.

Tangerang Selatan, 24 September 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Tangerang Selatan



Mursinah, S.H, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650904 200501 2 005

Lampiran

Metadata Indikator Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025-2029

1. Indek Pembangunan Pemuda (IPP)

Nama Indikator	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi	Indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Lima domain tersebut adalah (I) Domain Pendidikan, (II) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (III) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, (IV) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (V) Domain Gender dan Diskriminasi.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	- IPP menunjukkan sejauh mana pembangunan kepemudaan berhasil meningkatkan kesehatan, pendidikan, keterampilan, partisipasi, kesetaraan gender, serta kesempatan kerja bagi pemuda usia 16–30 tahun. - Semakin tinggi angka IPP (mendekati 100), semakin baik kondisi pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. **Indek Pembangunan Olahraga (IPO)**

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Definisi	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indeks tahunan yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia. Indeks ini dinilai dari sembilan dimensi dasar, mulai dari sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Semakin tinggi skornya, maka semakin baik capaian pembangunan olahraga di Indonesia.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Semakin mendekati 1,00 semakin tinggi pula capaian pembangunan olahraga di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. **Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Definisi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri adalah proses meningkatnya jumlah dan peran aktif generasi muda (umumnya berusia 16-30 tahun) dalam aktivitas kewirausahaan, yang meliputi perintisan usaha, manajemen produksi, serta pengorganisasian sumber daya untuk menciptakan nilai tambah dan keuntungan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri $= \left(\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30th) yg berwirausaha}}{\text{Jumlah total pemuda Kab/Kota}} \right) \times 100\%$

Interpretasi	• Jika hasilnya positif, berarti terjadi pertumbuhan jumlah wirausaha muda. • Jika hasilnya negatif, berarti terjadi penurunan jumlah wirausaha muda. • Semakin tinggi angkanya, semakin baik karena menunjukkan peningkatan minat, partisipasi, dan keberhasilan pemuda dalam berwirausaha.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

4. **Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)**

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar keterlibatan pemuda dalam kegiatan kolektif yang bersifat formal maupun non-formal, baik melalui organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, pramuka, organisasi mahasiswa/pelajar, komunitas pemuda) maupun organisasi sosial kemasyarakatan seperti kelompok keagamaan, komunitas sosial, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\begin{aligned} & \text{Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan} \\ &= \left(\frac{\text{Jumlah pemuda aktif dalam organisasi}}{\text{Jumlah total pemuda}} \right) \times 100\% \end{aligned}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak pemuda yang terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

5. Jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional

Nama Indikator	Jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional
Definisi	Jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional adalah banyaknya atlet muda yang berhasil meraih prestasi berupa juara atau medali pada ajang kompetisi olahraga resmi yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tertentu
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah Atlet Muda Berprestasi</i> <i>=Jumlah atlet muda yang meraih juara/medali pada tingkat nasional dan internasional</i>
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

6. Jumlah Cabor dengan atlet berprestasi nasional dan internasional

Nama Indikator	Jumlah Cabor dengan atlet berprestasi nasional dan internasional
Definisi	Jumlah cabang olahraga (cabor) yang memiliki atlet yang berhasil meraih prestasi atau memperoleh medali/gelar pada tingkat nasional (misalnya Kejurnas, PON) dan/atau internasional (misalnya SEA Games, Asian Games, Olimpiade, kejuaraan dunia)
Rumus Perhitungan	<i>Sudah jelas</i>
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

7. Prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional

Nama Indikator	Prestasi kepramukaan pada tingkat nasional dan internasional
Definisi	<i>Capaian atau penghargaan yang diperoleh anggota Gerakan Pramuka dalam berbagai kegiatan, perlombaan, atau ajang kepramukaan resmi yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional, baik secara individu maupun kelompok, yang diakui oleh Kwartir Gerakan Pramuka atau organisasi kepramukaan.</i>
Rumus Perhitungan	<i>Sudah jelas</i>
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Definisi	<i>Sudah jelas</i>
Rumus Perhitungan	<i>Sudah jelas</i>
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)
Frekuensi	Tahunan

9. Nilai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

Nama Indikator	Nilai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat
Definisi	Nilai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat adalah ukuran tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nilai ini umumnya diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala, dengan menggunakan instrumen kuisioner terhadap responden penerima layanan.
Rumus Perhitungan	<i>Sudah jelas</i>
Interpretasi	Nilai kepuasan Pelayanan masyarakat diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
Definisi	<i>Sudah jelas</i>
Rumus Perhitungan	<i>Sudah jelas</i>
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

11. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan

Nama Indikator	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan
Definisi	Jumlah inovasi yang telah dikembangkan oleh perangkat daerah (misalnya inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, atau teknologi) yang tidak hanya berhenti pada tahap ide/prototipe, tetapi benar-benar dimanfaatkan/digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan.
Rumus Perhitungan	Sudah jelas
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio wirausaha pemuda

Nama Indikator	Rasio wirausaha pemuda
Definisi	Rasio Wirausaha Pemuda adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pemuda yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan jumlah total pemuda pada periode tertentu di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri, baik dalam sektor formal maupun informal.
Rumus Perhitungan	Rasio wirausaha pemuda $= \left(\frac{\text{Jumlah wirausaha muda periode akhir} - \text{Jumlah wirausaha muda periode awal}}{\text{Jumlah wirausaha muda periode awal}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

13. Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi

Nama Indikator	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Definisi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi adalah banyaknya pemuda yang ditetapkan melalui proses seleksi resmi oleh pemerintah daerah sebagai pemuda yang memiliki prestasi, inovasi, kepeloporan, serta kontribusi nyata dalam bidang tertentu (seperti pendidikan, sosial budaya, pangan, lingkungan, teknologi, dan lain-lain) pada tingkat provinsi.
Rumus Perhitungan	Sudah jelas
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas

Nama Indikator	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas
Definisi	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah cabang olahraga (cabor) dari suatu daerah yang atletnya berhasil mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dengan jumlah total cabang olahraga yang dibina di daerah tersebut, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase cabor yang masuk pelatnas} = \left(\frac{\text{Jumlah cabor yang masuk pelatnas}}{\text{Jumlah total cabor yang dibina daerah}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Frekuensi	Tahunan
-----------	---------

15. Persentase atlet yang masuk Pelatnas

Nama Indikator	Persentase atlet yang masuk Pelatnas
Definisi	Persentase atlet yang masuk Pelatnas adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah atlet dari suatu daerah yang berhasil terpilih mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dengan total jumlah atlet daerah tersebut dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas pembinaan olahraga di daerah mampu menghasilkan atlet yang berprestasi hingga tingkat nasional dan layak mengikuti program Pelatnas sebagai persiapan menghadapi kejuaraan internasionala
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase atlet yang masuk pelatnas} = \left(\frac{\text{Jumlah atlet yang masuk pelatnas}}{\text{Jumlah atlet yang dipertimbangkan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

16. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Definisi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan adalah ukuran yang menggambarkan keterlibatan masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, dan pemuda, dalam kegiatan kepramukaan sebagai wadah pendidikan nonformal. Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat berperan aktif dalam mengikuti, mendukung, dan mengembangkan gerakan pramuka dibandingkan dengan jumlah sasaran penduduk pada kelompok usia tertentu.

Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan $= \left(\frac{\text{Jumlah anggota aktif}}{\text{Jumlah total sasaran masyarakat yang ditetapkan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

17. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Definisi	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterpenuhan penyusunan dokumen perencanaan oleh perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan, konsistensi, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Presentase pemenuhan dokumen perencanaan PD} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terpenuhi}}{\text{Jumlah dokumen yang seharusnya ada}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	<i>Sudah jelas</i>
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

18. Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
Definisi	Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan operasional perangkat daerah telah terpenuhi dibandingkan dengan total kebutuhan yang seharusnya tersedia. Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program kerjanya secara optimal.
Rumus Perhitungan	$Presentase\ pemenuhan\ operasional\ PD = \left(\frac{\text{Jumlah kebutuhan yang terpenuhi}}{\text{Jumlah total kebuthan yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Sudah jelas
Sumber Data	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan